

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM BLT (BANTUAN LANGSUNG TUNAI) DAN PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Lamgugob)**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD NABIL
NIM. 170602138**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nabil
NIM : 170602138
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Desember 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Nabil

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

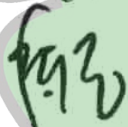
**Analisis Efektivitas Program BLT (Bantuan Langsung Tunai)
dan PKH (Program Keluarga Harapan) dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif
Ekonomi Islam
(Studi di Desa Lamgugob)**

Disusun oleh :

Muhammad Nabil
NIM: 170602138

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Cut Dian Fitri, M.Si., AK., C.A
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II,



Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802262023212035

AR - R A N I R Y

Mengetahui,
Ketua Prodi Ek onomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Efektivitas Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lamgugob)

Muhammad Nabil


NIM: 170602138

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 7 Desember 2023 M
23 Jumadil Awal 1445

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Cut Dian Fitri, M.Si., AK., C.A
NIP. 198307092014032002


Sekretaris,


Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802262023212035

Penguji I,


Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag, MA
NIP. 197204282005011003

Penguji II,


Rina Desiana, M.E
NIP. 199112102019032018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama Lengkap : Muhammad Nabil
NIM : 170602138
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 170602138@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Efektivitas Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lamgugob)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 7 Desember 2023 M

Mengetahui,

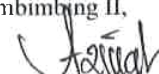
Penulis,


Muhammad Nabil
NIM: 170602138

Pembimbing I,


Cut Dian Fitri, M.Si., AK., C.A
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II,


Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802262023212035

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak harus mengikuti arah jalan, Kamu bisa membuat jalanmu sendiri lalu tinggalkan jejak disana.”

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur serta sembah sujudku kepada Allah SWT, shalawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda (Syawaluddin), Ibunda (Nurlena), serta seluruh keluarga yang saya sayangi. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat dekat saya yang telah membantu dikala saya kurang memahami dalam mengerjakan skripsi ini, dan juga sahabat-sahabat seperjuangan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang mana telah membantu dan menghibur di saat susah maupun bahagia.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lamgugob)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas-Furqani, I.M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

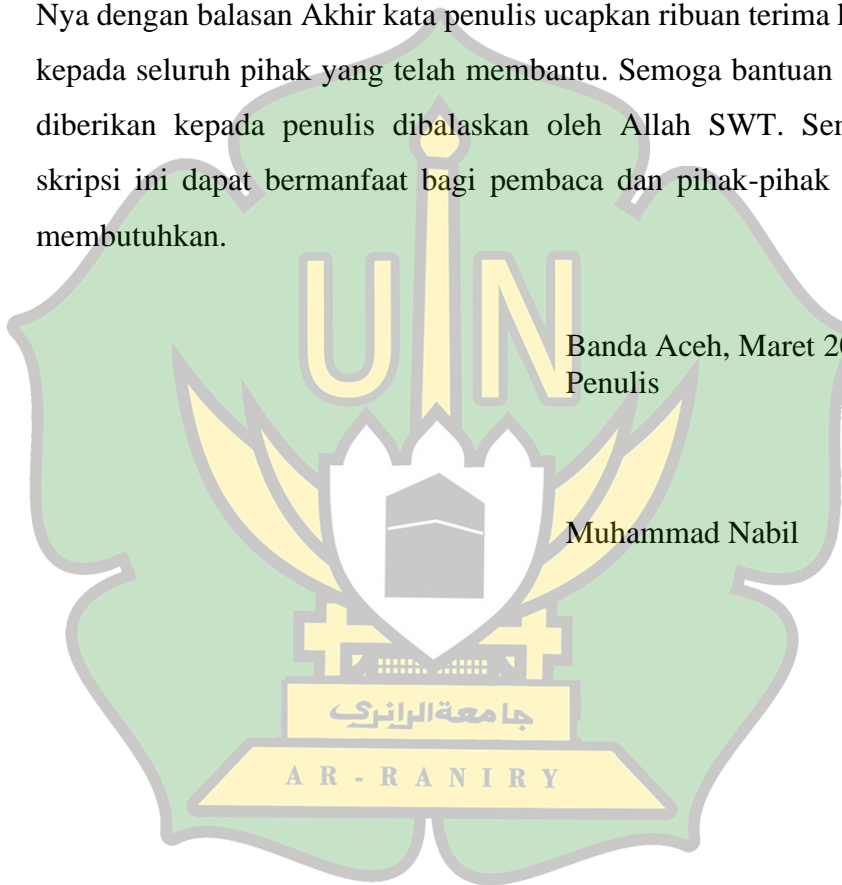
3. Hafiizh Maulana, SP., S.HI, ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Cut Dian Fitri, M.Si., AK., C.A selaku pembimbing I sekaligus penasihat akademik dan Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis. Serta telah memberikan saran, nasehat, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Syawaluddin dan Ibunda Nurlena yang selalu memberikan kasih sayang dan seluruh keluarga kerabat yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
7. Seluruh informan yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Bapak/ibu yang sangat berharga bagi penulis.

8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, Maret 2023
Penulis

Muhammad Nabil



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	AR - R A N I R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan *Tasawuf*.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Nabil
Nim : 170602138
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Efektivitas Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lamgugob)
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, M.Si., AK., C.A
Pembimbing II : Azimah Dianah S.E., M.Si., Ak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program BLT (Bantuan Langsung Tunai) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamgugob, (2) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program PKH (Program Keluarga Harapan) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamgugob, (3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap efektifitas program BLT dan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamgugob.

Metode yang digunakan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara menelaah literatur kepustakaan, dan data resmi dari wawancara dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Penelitian diarahkan untuk mendapatkan data serta fakta yang berhubungan Efektivitas Program Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dan PKH (Program Kluarga Harapan) dalam meninngkatkan kesejahteraan rakyat.

Simpulan penelitian ini adalah: (1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi covid-19, termasuk desa Lamgugob yang mendapatkan dana Bantuan Langung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya,

(2) PKH pada masa pandemi covid-19 dapat membantu mereka untuk menambah pendapatan dan mencukupi kebutuhan. PKH lebih kepada kemampuan keluarga untuk membiayai anak sekolah. Selain untuk kebutuhan mereka menggunakan dana PKH untuk biaya pendidikan anak dan kesehatan keluarga,

(3) Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan ekonomi keluarga dilihat dari indikator fakir, miskin, dan gharimin. Penelitian ini mendapatkan bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH pada masa pandemi covid-19 hampir secara keseluruhan diberikan kepada kalangan atau orang fakir yaitu mereka yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Kata Kunci: BLT, PKH dan Kesejahteraan Masyarakat

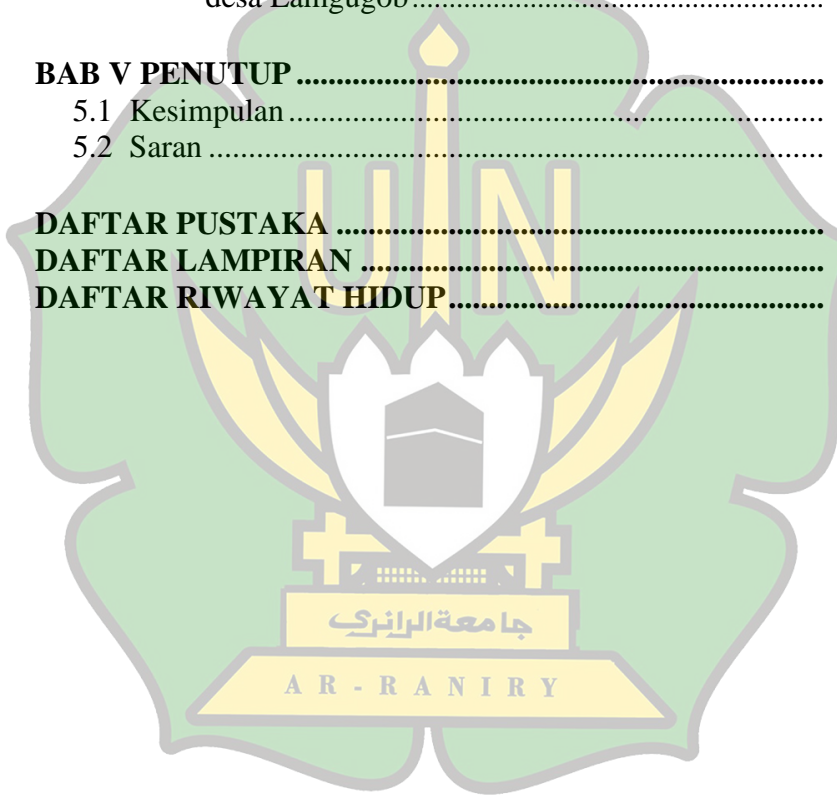


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Kesejahteraan Masyarakat	12
2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	12
2.1.2 Kesejahteraan dalam Persepektif Islam	14
2.1.3 Indikator Kesejahteraan dalam Islam	16
2.1.4 Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi ..	26
2.1.5 Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam	28
2.2 Efektivitas Program BLT dan PKH	30
2.2.1 Pengertian Efektivitas.....	30
2.2.2 Standarisasi Efektivitas	32
2.2.3 Indikator Efektivitas	35
2.3 Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH)	39
2.3.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)	39
2.3.2 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)....	42

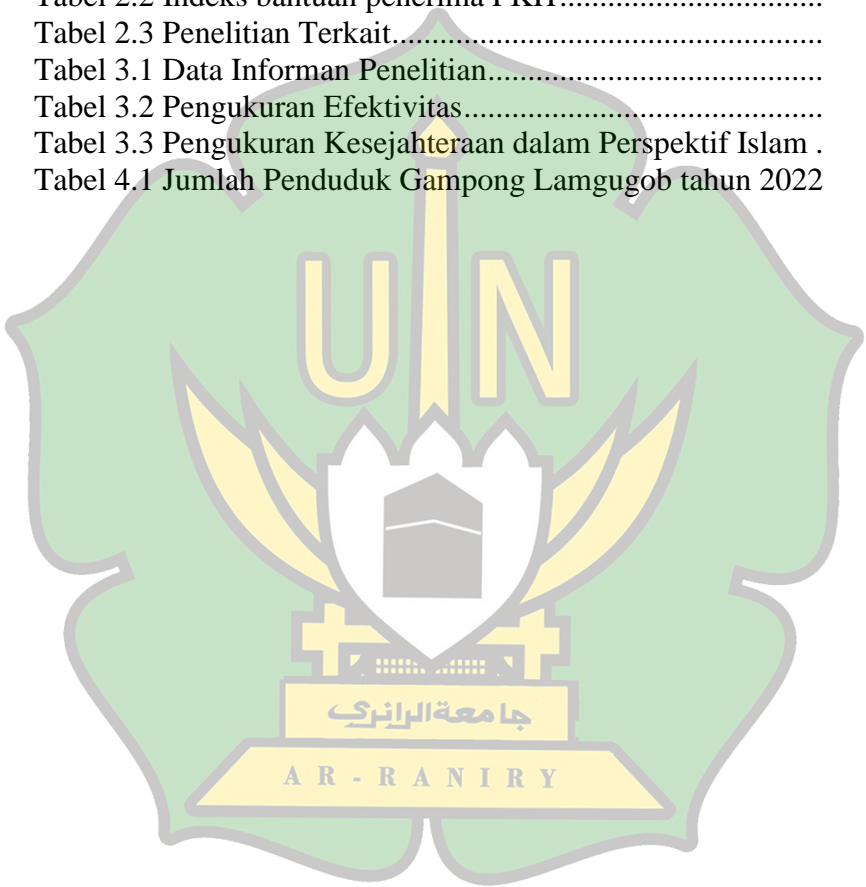
2.3.3	Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH)	45
2.3.4	Indikator Efektivitas PKH.....	48
2.3.5	Indikator Efektivitas BLT	49
2.4	Kemiskinan	50
2.4.1	Pengertian Kemiskinan.....	50
2.4.2	Indikator Kemiskinan	52
2.4.3	Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam	57
2.4.4	Indikator Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	59
2.5	Penelitian Terkait	60
2.6	Kerangka Berpikir	70
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		72
3.1	Desain Penelitian	72
3.2	Lokasi Penelitian	72
3.3	Sumber Data	72
3.3.1	Data Primer	73
3.3.2	Data Sekunder	73
3.4	Subjek dan Objek Penelitian.....	73
3.4.1	Subjek Penelitian.....	73
3.4.2	Objek Penelitian	74
3.5	Teknik Pengumpulan Data	74
3.5.1	Wawancara.....	75
3.5.2	Observasi.....	75
3.5.3	Dokumentasi.....	75
3.6	Instrumen Penelitian	76
3.7	Teknik Analisis Data	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		79
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	79
4.1.1	Sejarah Singkat.....	79
4.1.2	Letak Geografis	81
4.1.3	Visi dan Misi Desa Lamgugob.....	82
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	85

4.2.1 Efektivitas Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di desa Lamgugob.....	85
4.2.2 Efektivitas Program PKH (Program Keluarga Harapan) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di desa Lamgugob.....	90
4.2.3 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Efektifitas Program BLT dan PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di desa Lamgugob.....	94
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR LAMPIRAN	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	119



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2013-2020	4
Tabel 2.1 Komponen dan Kriteria Penerima PKH	47
Tabel 2.2 Indeks bantuan penerima PKH	47
Tabel 2.3 Penelitian Terkait	67
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	74
Tabel 3.2 Pengukuran Efektivitas	76
Tabel 3.3 Pengukuran Kesejahteraan dalam Perspektif Islam .	77
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Gampong Lamgugob tahun 2022	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	71
Gambar 4.1 Peta Desa Lamugob	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Penelitian109



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya untuk mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat diantaranya dengan melakukan pembangunan ekonomi. Kegiatan ekonomi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Kriteria utama pemilihan sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah kemiskinan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas dalam rencana jangka menengah nasional, meliputi lima sasaran pokok, yaitu: pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan kualitas manusia, perbaikan mutu lingkungan hidup, dan pengelolaan sumberdaya alam serta peningkatan infrastruktur (Yuliana, 2020). Implementasinya, yang menjadi prioritas utama pembangunan nasional diberikan kepada pemeliharaan kesejahteraan rakyat, penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.

Indonesia merupakan termasuk negara yang menjadikan kesejahteraan bangsanya sebagai tujuannya. Kesejahteraan dipersepsikan sebagai suatu pertumbuhan yang tinggi dalam

pembangunan ekonomi. Pendekatan ini sudah banyak negara yang berhasil mencapainya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah meningkatnya akumulasi kapital dan pendapatan per kapita (Arsyad,2017). Namun demikian, keberhasilan ini hanya dinikmati oleh pemilik modal dan kelompok elit nasional.

Kondisi sejahteraan terjadi jika kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta memperoleh perlindungan dari risiko-risiko yang mengancam kehidupannya. Kesejahteraan membahas tentang bagaimana akhirnya kegiatan ekonomi bisa berjalan secara optimal dan juga akan memikirkan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di negara-negara maju ada sistem bantuan kesejahteraan, program menanggulangi kemiskinan dan program membantu industri yang membutuhkan. Program semacam ini masih belum banyak dijumpai di Indonesia, hingga mereka yang mengalami kesulitan ekonomi harus mengandalkan pertolongan dari teman-teman, sanak saudara, atau orang lain yang mereka kenal, dan seandainya tidak berhasil mereka sendiri yang harus menanggung nasib karna kebutuhan hidup tidak tercukupi karena terjadinya kemiskinan.

Menurut Tamboto (2019), kemiskinan didefinisikan jika seseorang gagal memenuhi kebutuhan dasar, seperti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hal ini menjadi kriteria yang penting dalam memenuhi fungsi minimal pada indikator

kemiskinan. Seiring dengan perkembangan semangat umat Islam untuk berusaha menerapkan ajaran agamanya, muncul kajian tentang kesejahteraan dalam perekonomian menurut syariah Islam. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah atau hukum-hukum Islam. Meskipun belum semua meyakini akan tercapainya dalam menyelesaikan masalah-masalah perekonomian, sosial, politik, hukum, budaya, dan berbagai masalah alam, namun paradigma ini memberikan pemahaman yang sempurna tentang alam semesta yaitu langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia sebagai khalifah didalamnya.

Islam memandang bahwa kemiskinan juga dipandang sebagai suatu masalah hidup bahkan musibah yang harus dihilangkan. Kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas bekerja dan berusaha. Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan dan selalu taat dalam beribadah. Dalam *Qamus al-Muhit* kata miskin diartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu, memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya, atau orang yang dibuat diam oleh kefaqiran, dan dapat juga diartikan dengan orang yang hina dan lemah. Sedangkan kata miskin di dalam kamus Lisan Arab diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa, dan ada juga yang mengatakan, miskin

adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2021) bahwa, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, dibanding pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin Maret 2021 perkotaan naik sebanyak 138,1 ribu orang (dari 12,04 juta orang pada September 2020 menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 2013-2020

Tahun¹ <i>Year¹</i>	Garis Kemiskinan <i>(rupiah/kapita/bulan)</i> <i>Poverty Line</i> <i>(rupiah/capita/month)</i>	Jumlah Penduduk Miskin <i>(ribu)</i> <i>Number of Poor People</i> <i>(thousand)</i>	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	493.558	19,40	8,03
2014	500.768	19,42	7,78
2015	523.444	19,30	7,72
2016	541.732	18,80	7,41
2017	572.295	19,23	7,44
2018	607.391	19,13	7,25
2019	628.493	19,42	7,22
2020	674.977	18,97	6,90

Sumber: BPS, 2022.

Dari Tabel 1.1 didapatkan bahwa terjadi peningkatan pada garis kemiskinan akan tetapi jumlah penduduk terjadi penurunan

dengan persentase (6,9%) di tahun 2020. Upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dan mampu membantu dalam mengurangi beban pengeluaran bagi keluarga miskin yakni melalui program – program yang sudah di laksanakan salah satunya seperti BLT dan PKH.

Hingga saat ini Islam sering mendapat citra negatif soal kemiskinan. Islam sering dilekatkan dengan kondisi kemiskinan umatnya, bahkan sering dituding sebagai penyebab kemiskinan. Fakta dan data menunjukkan hal tersebut, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Nabil Subhi Ath-Thawil, beliau mencoba memaparkan masalah kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara muslim. Pada penelitian tersebut beliau menyatakan bahwa 30 dari 36 negara termiskin di Asia dan Afrika sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Pada tahun 2005 Program BLT telah dilaksanakan, lalu pada tahun 2008 pemerintah kembali melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai seperti pada 2005 dengan tujuan memberikan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak kepada rumah tangga miskin. Kemudian sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya memberi perlindungan social bagi keluarga miskin. Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu mengurangi beban pengeluaran. Peserta PKH hingga tahun 2015 mencapai 3,5 juta keluarga miskin. Tahun 2016

penambahan target sejumlah 2,5 juta keluarga sehingga jumlah total mencapai 6 juta keluarga (Susanto, 2018).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai Program kompensasi jangka pendek yang tujuan utamanya adalah menjaga agar tingkat konsumsi rumah tangga yang tergolong miskin tidak menurun pada masa pandemi saat ini yang terjadi di Indonesia. Walaupun program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) bukan satu satunya program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, dengan demikian namun di harapkan dapat mendorong pengurangan tingkat kemiskinan. Dalam hal ini diharapkan BLT dan PKH dapat membantu dan meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya (Suleman, 2017).

Disisi lain, kebijakan BLT dan PKH ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. BLT dan PKH masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sudah sedikit tertutupi dengan adanya dana cuma-cuma dari pemerintah melalui dana desa. Disisi lain kebijakan ini memiliki dampak negatif yakni kebijakan ini akan berdampak negatif pada perilaku dan karakter masyarakat yang akan menjadi malas dan selalu mengharapkan bantuan setelah bantuan ini berakhir. Permasalahan efektifitas dan efisiensi kebijakan ini juga diragukan, karena pemerintah desa hanya memberikan uang tunai tanpa adanya pengawasan kepada masyarakat yang menerima bantuan. tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan dana BLT dan PKH. Artinya,

penerima dapat menggunakan dana untuk keperluan apapun, pada umumnya penerima menggunakan dana BLT dan PKH untuk membeli beras, biaya listrik dan biaya kontrak rumah, serta melunasi utang, selain itu ada juga penerima menggunakan dana bantuan untuk biaya kesehatan dan tidak ada yang menggunakan uang untuk modal usaha, lebih banyak yang menggunakannya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga (Ningsih, 2017).

Melihat dari dampak yang ditimbulkan, kebijakan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat miskin di Indonesia. Selain itu, dampak yang ditimbulkan kebijakan BLT dan PKH tersebut tidak mampu memberikan dampak positif pada peningkatan produktifitas masyarakat miskin, melainkan cenderung memberikan dampak negatif pada penurunan produktifitas masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Efektivitas Efektivitas Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lamgugob)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, saya sebagai peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan akan menarik beberapa permasalahan yang mengenai Efektifitas Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. Adapun permasalahan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program BLT (Bantuan Langsung Tunai) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamgugob?
2. Bagaimana efektivitas program PKH (Program Keluarga Harapan) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamgugob?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap efektifitas program BLT dan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamgugob ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program BLT (Bantuan Langsung Tunai) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamgugob.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program PKH (Program Keluarga Harapan) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamgugob.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap efektifitas program BLT dan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamgugob.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat berupa:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam wawasan yang berhubungan dengan Efektivitas Program Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (program keluarga harapan) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dapat dijadikan sebagai produk penelitian di Jurusan Ekonomi Syariah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi civitas kepastakaan akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

c. Bagi Pemerintah Daerah

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efektifitas penyaluran program (BLT) dan program (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan agar dasar penetapan dan kriteria penerima dana (BLT) tepat sasaran.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada lembaga pemerintahan Banda Aceh, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Program BLT

(Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan).

- b. Mengetahui keadaan sebenarnya mengenai penerapan Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Lamugob.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci, singkat dan jelas. Serta diharapkan dapat mempermudah dalam memahami proposal penelitian. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini akan diuraikan pada paragraf dibawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Menyajikan pendahuluan dari seluruh penulisan yang berisi latar belakang sebagai landasan pembahasan lebih lanjut, perumusan masalah yang berguna untuk memfokuskan pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Menyajikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, Efektivitas Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan), definisi jual beli online, Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan), Kesejahteraan Masyarakat, Konsep Distribusi, pembahasan

hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan proposal ini, dan kerangka pemikiran yang menerapkan secara ringkas kaitan antara variabel yang akan diteliti sesuai teori atau fakta lapangan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Berisi pendekatan atau metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis data, operasional variable yang digunakan serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai laporan hasil penelitian yang ditemui di lapangan yang menyangkut dengan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan tahapan terakhir dari penelitian yang membahas kesimpulan dari hasil-hasil penelitian secara menyeluruh dan berisi beberapa saran untuk kedepan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata sejahtera yang memiliki makna aman, makmur, sentosa dan selamat atau dapat diartikan juga sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada suatu keadaan yang sedang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang berada dalam keadaan damai, sehat, dan makmur.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi tercukupinya kebutuhan yang bersifat material, spiritual, dan sosial warga negara agar mempunyai hidup yang layak dan memiliki kapasitas untuk berkembang, sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya (Samud, 2018). Sedangkan penyelenggaraan perlindungan sosial adalah upaya terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Diantaranya adalah masalah rehabilitasi sosial, peningkatan status sosial, jaminan dan perlindungan sosial (UU No. 11 2009).

Tujuan utama dari perlindungan sosial adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat. Kedua, mengembalikan fungsi sosial untuk mencapai kemandirian. Ketiga, memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah

kesejahteraan sosial. Keempat, meningkatkan kesadaran, kapasitas dan tanggung jawab sosial dalam melaksanakan kesejahteraan sosial secara kelembagaan dan berkesinambungan. Kelima, meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kualitas manajemen pelaksanaan pekerjaan perlindungan sosial.

Jika tingkat kesejahteraan yang benar dapat tercapai, kehidupan seseorang akan nyaman, damai, dan bahagia. Inilah tujuan dasar kehidupan manusia di muka bumi ini pada umumnya. Kesejahteraan juga diterjemahkan dari kata kemakmuran yang berarti kemajuan dan keberhasilan, terutama dalam hal pendapatan dan perolehan kekayaan. Jadi, kebahagiaan memiliki arti yang lebih luas, yaitu keadaan atau perasaan sejahtera dan senang, yang dihasilkan dari terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual (Ilyas, 2016).

Suatu keadaan atau kondisi kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan, kenyamanan, keamanan baik bagi individu maupun masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau makmur. Dan tujuan akhir dari keadaan yang sehat, bahagia, nyaman dan aman adalah keselamatan. Dalam hal ini adalah keselamatan dunia dan akhirat. Dalam bahasa Arab kebahagiaan dikenal dengan kata rofahiyah yang berarti waktu luang dan kemakmuran. Kemudian kata Daula rofahiyah berarti bangsa yang sejahtera. Seperti yang telah dijelaskan di atas, ada perbedaan makna antara kebahagiaan dan kemakmuran itu sendiri (Ali dan Muhdlor 2016).

Berdasarkan definisi diatas lahirlah beberapa istilah yang berkaitan dengan kesejahteraan salah satunya adalah Kesejahteraan masyarakat, yang memiliki definisi dan makna tersendiri. Masyarakat sejahtera adalah sekelompok individu dalam komunitas yang terorganisir, mengikuti sistem atau aturan untuk tujuan yang sama, hidup bersama dalam kondisi yang aman dan bahagia, kemudian memiliki kebutuhan dasar, informasi tentang kebutuhan pangan, tempat tinggal, akses ke kesehatan dan pendidikan, pendapatan dan mungkin perlindungan. dari mengambil resiko yang mengancam nyawa seseorang (Setiawan, 2017). Bekerja sama untuk kebaikan bersama tanpa mengorbankan kepentingan pribadi. Hal tersebut merupakan salah satu indikator masyarakat yang sejahtera. Dan bisa disebut sejahtera jika indikator-indikator di atas terpenuhi secara bersamaan.

Berdasarkan beberapa definisi kesejahteraan di atas, maka peneliti menyimpulkan konsep kesejahteraan itu sebagai sebuah kondisi dimana timbulnya perasaan nyaman dan nikmat, yang diperoleh dari terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material dan spiritual, baik berupa pemenuhan akan kebutuhan pokok, seperti makan, pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial (terhindar dari segala macam resiko yang mengancam).

2.1.2 Kesejahteraan dalam Persepektif Islam

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan memiliki padanan kata maşlahat. Maşlahat berarti sesuatu yang mendatangkan hal baik atau kebaikan, faedah, dan

guna. Sedangkan kemaslahatan berarti suatu kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan (Rusdi, 2017). Kesejahteraan masyarakat merupakan orang yang hidupnya terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga hidupnya aman dan tentram baik secara lahiriah maupun batiniah (Ahlan, 2019). Adapun kata “manfaat” berarti kegunaan dan manfaat. Adapun bermanfaat artinya, ada manfaatnya, bermanfaat, berguna. manfaat juga dipahami sebagai lawan dari kata mudharat yang berarti rugi atau buruk. Sedangkan kemakmuran berasal dari kata dasar makmur yang berarti banyak hasil, banyak orang dan kesejahteraan, semua tanpa kelangkaan, kemakmuran itu sendiri berarti berada dalam keadaan sejahtera.

Sejahtera dan kesejahteraan ditentukan dengan kondisi kebaikan, kegunaan, aman dan selamat dari berbagai gangguan dan kesusahann, atau ancaman yang terjadi dalam hidup yang lazim dikenal dengan kata mudharat atau kerusakan. Yang mencakup dua sisi, yaitu jasmani dan rohani. Sedangkan kemakmuran lebih kepada materi yakni barang dan jasa. Yang hanya mencakup sisi jasmani tanpa mencakup dimensi rohani. Oleh karena itu kesejahteraan dan kemakmuran dua kata yang berbeda makna baik secara bahasa dan istilah.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori Maqashid Syariah. Maqashid syariah menurut al-syatibi. Dimana beliau berpendapat bahwa tujuan akhir dari suatu aturan syariah adalah kemaslahatan bagi manusia, baik kehidupan di dunia ini

maupun kehidupan yang akan datang (akhirat). Dilihat terutama dari sudut pandang Maqashid Syariah, mengandung empat aspek tujuan utama. Pertama, tujuan al-syari' dalam menetapkan aturan syariah adalah untuk kepentingan manusia di dunia dan akhirat (falah), kedua adalah sesuatu yang harus dipahami, ketiga hukum taklifi yang harus dilaksanakan dan keempat adalah untuk menempatkan manusia di bawah naungan hukum dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, dapat memastikan bahwa kepentingan setiap orang tetap terjaga. Dengan berperilaku dan melakukan aktivitas sesuai petunjuk Syariah, maka akan mencapai kemaslahatan dalam hidup dan terhindar dari berbagai masalah (Solihin, 2019).

2.1.3 Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin apabila belum tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau mendeskripsikan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Purwarna, 2014).

Maslahat sebagai tujuan dari Maqasid syariah terdiri dari: dharuriyyah (primer), hajiyyah (sekunder) dan tahsiniyyah (tersier). Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan

universal. Bersifat umum artinya juga semua secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan pada jenjang atau masa tertentu saja, akan tetapi juga untuk sepanjang waktu selama kehidupan itu masih ada (Fauzia, 2014).

Dalam hal mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli usul fiqh telah meneliti dan menetapkan bahwa ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima unsur pokok tersebut bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan dasar syariah. Kelima pokok tersebut pula merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini. Hal ini dikarenakan bagian dari dharuriyah, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan bagi umat manusia.

1. *Dharuriyyah*

Dharuriyyah adalah pelaksanaan kemaslahatan atau kebaikan agama dan dunia. Dimana apabila dharuriyah itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan lenyap. yang akan mengakibatkan kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan di dunia (Kamarudin, 2022). Dharuriyyah ini dimana tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Keperluan dan perlindungan dharuriyah ini dalam buku ushul fiqh, termaksud as-syathi, membagi menjadi lima perkara (al-kulliyat al-khams), yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperuntukkan untuk:

a. Menjaga Agama (*Hifdzul Din*)

Dalam Islam, sangat penting untuk menegakkan agama yang dianut seseorang dan untuk menjamin hak setiap orang untuk kebebasan beribadah karena agama adalah pedoman hidup manusia. Selain komponen iman yang merupakan sikap hidup seorang muslim, juga terdapat syari'at yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dalam hubungannya dengan manusia (Sahroni dan Karim, 2016). Untuk memelihara agama, Allah mewajibkan manusia untuk shalat, zakat, puasa, dan pergi haji. Ketika orang tidak menjalankan perintah atau ibadah Allah, mereka akan mendapatkan ganjaran atau berdosa.

b. Menjaga Jiwa (*Hifdzul Nafs*)

Melindungi jiwa berarti melindungi hak untuk hidup bermartabat agar tidak dibunuh, dianiaya, difitnah dan perbuatan zalim lainnya. Allah melarang perbuatan yang dapat membunuh dan membinasakan umat manusia. Allah menghormati atau memelihara jiwa manusia, misalnya untuk menjaga jiwa manusia, Allah menghalalkan makanan yang awalnya haram ketika didalam kondisi terdesak. Umat Islam memiliki kewajiban untuk melindungi diri sendiri dan orang lain agar tidak saling menyakiti. Manusia dikatakan saling mencintai dan berbagi cinta dalam ajaran

agama Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW (Yuliharti, 2019).

c. Menjaga Akal (*Hifdzul Aql*)

Menjaga akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tidak berguna lagi. Akal membuat manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Jika seseorang telah rusak akalnya maka dapat melakukan apa saja yang akan membahayakan dan merugikan orang lain juga. Allah melarang manusia meminum minuman yang dapat memabukkan manusia. Semua jenis makanan dan minuman yang dapat menimbulkan kerusakan pada akal manusia, seperti alkohol, adalah haram hukumnya atau dilarang (Wijaya, 2017). Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang cerdas atau memiliki akal. Menjaga akal merupakan tujuan yang penting dari sudut pandang Islam karena akal adalah yang menentukan perbuatan baik atau buruk seseorang, sehingga akal harus tetap dipertahankan untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini dan akhirat (Duryat, 2021).

d. Menjaga Keturunan (*Hifdzul Nasb*)

Menjaga keturunan adalah melestarikan manusia dan menumbuhkan sikap spiritual generasi penerus agar manusia dapat menjalin rasa solidaritas dan persahabatan antar sesama. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan

perkawinan yang sah menurut ketentuan syariah, sehingga dapat terbentuk keluarga yang baik (Nurhayati dan Wasilah 2019). Untuk mempertahankan kehidupan, maka manusia harus mempertahankan generasi penerus yaitu anak-anak dan keluarga. Kesenambungan keturunan dan kelanggengan dari generasi ke generasi harus diperhitungkan karena keturunan akan menjadi pewaris kehidupan yang akan menentukan baik atau buruknya kehidupan kedepannya (P3EI, 2015).

e. Menjaga Harta (*Hifdzul Mal*)

Manusia membutuhkan harta untuk kehidupan sehari-hari termasuk dalam beribadah, seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain. Dalam melindungi harta, Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah SWT, manusia hanya berhak untuk mengelola dan memanfaatkannya. Umat Islam menuntut untuk berusaha mencari dan melindungi hartanya secara baik dan halal (P3EI, 2015). Menjaga harta bertujuan supaya harta yang telah dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Syariat islam telah mengatur semua proses perolehan dan pengeluaran harta. Dalam mendapatkan harta haruslah terbebas dari unsur riba, penipuan, maisir, mencuri, dan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Kemudian untuk penggunaan harta yang telah dimiliki juga harus sesuai dengan tuntunan syariah, seperti kewajiban

membayar zakat, tidak boros, dan tidak kikir (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Al-mal atau harta benda dalam hal ini ditempatkan pada posisi terakhir dengan alasan bahwa harta bukanlah tujuan utama, akan tetapi hanya sebagai alat perantara yang dipergunakan untuk menghadirkan kesejahteraan. Dalam memperoleh harta diperlukan nilai-nilai agama atau akhlak spritual, juga dalam pengelolaan perekonomian dan perpolitikan, agar harta yang didapatkan tidak dijadikan sebagai tujuan hidup. Apabila hal itu terjadi, maka akan membawa kezhaliman, kesenjangan sosial, kerusakan pada lingkungan dan kemudharatan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Apabila kelima hal diatas dapat terwujud, maka akan tercapai kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat nantinya yang dalam ekonomi Islam disebut dengan *falah*. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan memberikan nilai maslahat atau manfaat, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam kehidupan masyarakat. Jika kelima hal ini tidak dilakukan dengan baik atau tidak dapat terpenuhi, maka kehidupan tidak akan berjalan mulus atau berdampak negatif pada kelangsungan hidup manusia tersebut.

2. Hajiyyah

Hajiyyah adalah *maqashid syariah* tahap kedua, di mana pada tingkatan ini merupakan hal-hal yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat

membahayakan dan mengancam, yaitu jika sesuatu itu seharusnya ada. hajiyyah tidak akan menimpa siapa pun, dan kerusakan yang diakibatkannya tidak mempengaruhi kepentingan umum. Hajiyyah ini dapat dilihat sebagai kebutuhan sekunder atau sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan seseorang.

Hajiyyah juga disamakan dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah nilai tambah kehidupan manusia. Maka hal tersebut dapat menambah efisiensi, efektivitas dan value added bagi kehidupan manusia (Sataloff et.al).

3. Tahsiniyyah

Tahsiniyyah adalah tahap akhir dari maqashid al-syari'ah dimana arti tahsiniyyah adalah (tingkat ketiga) yaitu semua kebutuhan dan perlindungan yang diperlukan untuk membuat hidup lebih nyaman dan menyenangkan, lebih mudah, lebih luas dan lebih lapang. Dengan kata lain, ketika seseorang memasuki keadaan tingkat tahsiniyah, itu berarti telah mencapai suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi suatu kebutuhan yang dapat meningkatkan kepuasan hidupnya.

Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. Tahsiniyah identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan (Akbar dan Febriadi, 2018).

Ketiga kriteria diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpuaskan jika kebutuhannya terpenuhi, kebahagiaan itu sendiri memiliki beberapa aspek yang menjadi

indikatornya salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan harta benda seseorang. Manusia tidak dapat memisahkan unsur harta, karena harta merupakan salah satu faktor utama untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan (Karim, 2011).

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surah Quraisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya:

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”

Karena kedudukan yang Allah berikan kepada kaum Quraisy untuk menempati tempat di hati orang Arab, maka perlu (wajib) mereka mentauhidkan Allah sebagai pemilik rumah (Ka'bah) ini dan mengikhlaskan ibadah kepada -Nya. Allah lah yang telah memberi mereka makan dengan akal (dengan mudah) rihlah mereka, kelaparan yang ekstrim sebelum rihlah, dan ketakutan yang besar, Karena sebelum orang-orang Arab disandera. Tafsir (An-Nafahat Al Makkiyah).

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat kita lihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an memiliki tiga hal, yaitu pertama menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan rasa takut. Indikator pertama kebahagiaan adalah

ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan, pemilik Ka'bah menerapkan kepadanya dalam ikatan (ibadah) yang tulus sebagai indikator utama kebahagiaan (kebahagiaan sejati).

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (kepuasan konsumsi), kalimat di atas mengatakan bahwa Allah memberi mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar, yang menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, kepuasan kebutuhan konsumsi seseorang merupakan indikator kebahagiaan. Yaitu secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak berlebihan, apalagi menumpuk untuk kekayaan yang sebesar-besarnya, apalagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sejalan dengan perintah Allah dalam Surat Al-Qur'an di atas, jika ini terpenuhi maka kita tidak akan menyaksikan kasus seperti korupsi, penipuan, pemerasan dan bentukbentuk kejahatan lainnya (Athiyah, 2017).

Kemudian indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa atau perasaan takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Jika kejahatan seperti pencurian, tindakan pemerkosaan, pembunuhan, pembobolan dan kejahatan serupa lainnya banyak terjadi di masyarakat, itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki rasa aman, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain, orang tidak menerima kesejahteraan. Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surah An-nisaa' ayat 9:

وَلِيُحْشِ الْأَٰذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ۖ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS An-Nisaa’ ayat 9)

Dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggal dunia dan meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang masih kecil dan lemah, yang mereka takutkan mengalami kezhaliman atau tidak terurus, maka hendaknya mereka selalu merasa diawasi oleh Allah dalam memperlakukan orang yang berada di bawah tanggungannya dari anak-anak yatim dan anak-anak lainnya, yakni dengan cara menjaga harta benda mereka, mendidik mereka dengan baik, dan menyingkirkan segala gangguan dari mereka dan kemudian hendaklah berkata kepada mereka dengan ucapan yang sejalan dengan semangat keadilan dan yang baik-baik. (Tafsir al-Muyassar).

Ayat tersebut menganjurkan kepada manusia agar menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai bentuk usaha atau ikhtiar dan beriman kepada Allah. Dalam ayat di atas, Allah juga berpesan kepada umat manusia untuk menjaga generasi

(keturunsn) yang akan datang agar tidak jatuh miskin, hal ini dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan serta mendidik anak-anak dengan pendidikan yang berkualitas dengan orientasi moral dan materi yang baik. , agar menjadi sumber daya manusia yang terampil dan berkarakter baik di masa depan, mengingat anak sebagai aset paling berharga bagi orang tua (Ar Razie, 2013).

2.1.4 Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Seiring dengan semangat umat Islam untuk berusaha menerapkan ajaran agamanya, muncullah kajian tentang kesejahteraan dalam perekonomian yang berbasiskan syariah Islam. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai bila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah atau hukum-hukum Islam. Meskipun belum semua meyakini akan keampuannya dalam menyelesaikan masalah-masalah perekonomian, sosial, politik, hukum, budaya, dan berbagai masalah alam, namun paradigma ini memberikan pemahaman yang sempurna tentang alam semesta, yakni: langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia sebagai khalifah didalamnya.

Dalam kehidupan memang akan terjadi perbedaan dan kesenjangan ekonomi atau rezeki diantara pelaku ekonomi, karena hal tersebut merupakan sunnatullah. Kondisi inilah yang secara religius akan menciptakan mekanisme ekonomi, yang berkelebihan menolong yang kekurangan sehingga kesenjangan akan semakin menyempit walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali. Dengan

demikian hanya dengan tolong menolong dan saling memberilah, maka kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi, karena yang kaya membutuhkan yang miskin dan sebaliknya yang miskin membutuhkan yang kaya

Dalam perspektif ide atau gagasan, ternyata konsep kesejahteraan banyak mengadopsi pada paham kapitalisme dan sosialisme. Paham ini telah terbukti membawa banyak kegagalan dalam mengantarkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, muncullah sebuah alternatif konsep kesejahteraan yang mengacu pada nilai-nilai ajaran syariah Islam. Pada saat krisis ekonomi moneter melanda dunia, lembaga-lembaga ekonomi di negara-negara berkembang yang menerapkan mekanisme syariah terbukti dapat bertahan dan bahkan disebagiannya mampu untuk dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga berawal dari keberhasilannya ini mulailah banyak dikaji tentang konsep kesejahteraan yang berlandaskan pada ekonomi syariah Islam

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan (Purwarna, 2014). Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi

fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah: kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara (Nazilla, 2019). Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.

2.1.5 Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Sehingga konsep kesejahteraan Islam sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, dikarenakan perbedaan dalam memandang kehidupan.

Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang (Junaidi, 2021). Kebutuhan-kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan

riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi.

Dalam literatur lain menerangkan bahwa kesejahteraan dalam Islam terdapat empat indikator (Enggardini, 2017), yaitu; nilai ajaran Islam, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, dan keamanan serta ketertiban sosial. Adapun kesejahteraan perspektif ekonomi Islam berdasarkan klasifikasi sifat yaitu (Mardani, 2018):

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang

Mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual, akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungan sosialnya.

2. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat

Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, akan tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material spiritual pada kehidupan di dunia

maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah fala (Nurvita, 2019).

2.2 Efektivitas Program BLT dan PKH

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran (Maun, 2020). Efektifitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hal yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif (effective) dan efisien (efficient) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Nahdatullah et al, 2021)

Efektivitas juga berkaitan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang dapat diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pelanggan (Sunarti, 2019). Adapun penjelasan efektivitas menurut beberapa ahli lainnya adalah sebagai berikut:

4. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin besar pula efektif suatu organisasi, program atau kegiatan, Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely* (Olbata, 2018).
5. Efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan (Herawati,2020).
6. Efektivitas adalah suatu pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pelanggan, (Jaya 2020).
7. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan “standar” maka mereka dinilai semakin efektif (Gibson et.al Bungkaes 2013)
8. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif (Ravianto 2014).

Dalam perspektif islam secara etimologi terdapat kata *Al-fauz* berarti kemenangan, keberhasilan, kesuksesan atau efektif,

sedangkan menurut terminologi al-fauz adalah tercapainya suatu tujuan yang paling luhur yang tidak ada lagi tujuan setelah nya, baik yang bersifat Ruhiah ataupun jasmaniyah. Oleh karena itu dalam hal ini diharapkan yang diperoleh berupa kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), di dunia dapat berupa keberkahan umur atau umur panjang, kekayaan, kemuliaan, dan akhirat dapat berupa kekekalan atau abadi, kekayaan tanpa kebutuhan, kemuliaan tanpa kehinaan, dan pengetahuan tanpa kebodohan (Ismail, 2021).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, berkaitan dengan terlaksananya semua tugas utama, tercapainya tujuan, ketepatan waktu serta adanya partisipasi peserta atau anggota dalam mengerjakan tujuan tersebut, kemudian jika di implementasikan berdasarkan pandangan islam dalam efektivitas suatu organisasi atau program agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan juga harus disertai dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan nilai lainya yang tidak menyimpang dari hukum Islam.

2.2.2 Standarisasi Efektivitas

Ukuran efektivitas dalam suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau dapat diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Misalnya bila ada 10 tujuan kegiatan yang

kita rencanakan, dan tercapai hanya 4 kegiatan yang dapat dilaksanakan, maka efektivitas kegiatan kita masih belum tercapai. Demikian pula bila ada 10 tujuan yang kita inginkan dan ternyata 5 yang tercapai, maka usaha untuk mencapai tujuan tersebut masih dipandang kurang efektif. Parameter untuk mencapai Efektivitas dinyatakan sebagai angka nilai rasio antara jumlah hasil (lulusan, produk jasa, produk barang dan lain-lain) yang dicapai dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah (unsur yang serupa) yang diproyeksikan atau ditargetkan dalam kurun waktu tertentu (Reza, 2022).

Selain itu ketika tujuan yang diinginkan dapat dicapai atau direalisasikan melalui penyelesaian tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hal tersebut disebut sebagai efektivitas kerja. Menurut Siagian (2007:24), efektivitas didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang telah disepakati secara sadar sebelumnya, untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dari kegiatan yang dilakukan. Efektivitas mencerminkan keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dengan tingkat efektivitas yang semakin tinggi jika hasil kegiatan mendekati sasaran yang telah ditetapkan (Dua & Rumerung, 2022).

Dalam konteks teori efektivitas kerja yang dijelaskan oleh Siagian (2007:24), efektivitas merujuk pada kemampuan penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang telah disepakati sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang

atau jasa melalui kegiatan yang dilakukan. Efektivitas kerja dapat dilihat ketika tujuan yang diinginkan dapat tercapai atau direalisasikan melalui penyelesaian tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam konsep ini penting untuk menyadari, bahwa efektivitas kerja tidak hanya berkaitan dengan pencapaian tujuan secara umum, tetapi juga terkait dengan optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana yang telah disepakati sebelumnya mencerminkan perencanaan yang matang dan kesadaran dalam mengelola faktor-faktor pendukung kegiatan. Dengan kata lain, efektivitas kerja tidak hanya menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan tetapi juga bagaimana penggunaan sumber daya sesuai dengan rencana.

Konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Siagian menunjukkan, bahwa kunci dari efektivitas kerja adalah perencanaan yang baik, kesepakatan mengenai penggunaan sumber daya, dan kemampuan menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas yang tinggi dicapai ketika hasil kegiatan mendekati atau mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, konsep ini memberikan pandangan yang komprehensif mengenai evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan aspek pencapaian tujuan dan pengelolaan sumber daya secara efisien.

Demikian uraian diatas dapat disimpulkan, bahwasannya efektif disini merupakan sejumlah tujuan dan output yang dicapai

sebanding dengan yang telah direncanakan misalnya suatu kegiatan bisa dikatakan atau dinilai efektif apabila dari sekian program atau tujuan yang ingin dicapai minimal sudah mencapai 85% keatas dengan apa yang ditargetkan maka program atau tujuan tersebut baru bisa dikatakan efektif.

2.2.3 Indikator Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan cara membandingkan antara rencana atau target yang hendak dicapai dengan hasil yang telah dicapai, maka hasil dari pekerjaan tersebut yang dikatakan efektif, namun sebaliknya jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang telah ditargetkan atau direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif. Berikut indikator efektivitas (Rosalina, 2014)

1. Ketepatan dalam penentuan waktu: yaitu waktu yang dipergunakan dengan tepat dapat mempengaruhi pada tingkatan efektivitas sebuah program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Ketepatan dalam perhitungan biaya: dalam hal ini dilakukannya perhitungan supaya dalam menjalankan sebuah program bertujuan untuk menghindari kekurangan dana atau anggaran hingga program tersebut dapat dilaksanakan sampai selesai.
3. Ketepatan dalam pengukuran: yang berarti bahwa dalam menjalankan sebuah program haruslah menerapkan standarisasi yaitu sebuah patokan. Dimana ketepatan standar yang

diterapkan dalam pelaksanaan sebuah program merupakan salah satu ukuran dalam mencapai tingkat efektivitas.

4. Ketepatan menentukan pilihan: adalah kegiatan yang dilakukan untuk tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Dikarenakan dalam penentuan sebuah pilihan dibutuhkan proses yang begitu penting untuk mencapai tingkat efektivitas pada sebuah program.
5. Ketepatan dalam menentukan tujuan: yaitu tujuan yang dapat ditetapkan dengan tepat akan menunjang pada efektivitas pelaksanaan program tersebut.
6. Ketepatan sasaran: yakni dapat menentukan pada tingkat keberhasilan aktivitas individu atau suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Mughtar, 2016), indikator efektivitas adalah sebagai berikut:

a. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan perasaan seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukan sehingga mereka akan puas dalam memenuhi keterampilan, kemampuan, dan harapan pekerjaan mereka.

b. Produktivitas

Produktivitas adalah hubungan tindakan antara input dan output. Dalam misi dan tujuan organisasi, setiap instansi memiliki input dan output yang perlu disesuaikan.

c. Efisiensi

Efisiensi adalah pemaksimalan serta pemanfaatan dengan membandingkan beberapa aspek prestasi terhadap biaya.

d. Kemampuan Beradaptasi

Kemampuan beradaptasi untuk mengukur tingkatan organisasi dalam menyelesaikan perubahan internal maupun eksternal. Kemampuan beradaptasi mengacu pada kemampuan manajemen dalam merasakan perubahan yang ada di lingkungan organisasi.

e. Pengembangan

Adanya pengembangan dilakukan dalam mengukur kemampuan organisasi pada menaikkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan. Usaha pengembangan ini umumnya dilakukan menggunakan cara pembinaan pada karyawan

Efektivitas merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini penting, bahwa tujuan dan hasil yang diinginkan harus sejalan dan tidak saling bertentangan guna mencapai nilai efektif. Proses mencapai efektivitas memerlukan penggunaan sumber daya yang sesuai dengan indikator efektivitas. Sutrisno (2010) mengidentifikasi lima indikator efektivitas, yakni: 1) pemahaman program, 2) ketepatan sasaran, 3) ketepatan waktu, 4) pencapaian tujuan, dan 5) perubahan nyata (Fauziah et al., 2022).

Dalam konteks teori efektivitas yang dijelaskan, efektivitas merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mencapai hasil

yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, efektivitas tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hubungan ini, penting bahwa tujuan yang ditetapkan dan hasil yang diinginkan harus sejalan dan tidak saling bertentangan. Ini berarti bahwa efektivitas mencapai nilai tertinggi ketika langkah-langkah yang diambil menuju tujuan sesuai dengan rencana dan tidak menimbulkan konflik antar tujuan.

Sutrisno (2010) mengidentifikasi lima indikator efektivitas yang memberikan gambaran lebih rinci tentang bagaimana efektivitas dapat diukur:

- a. Pemahaman Program: Menunjukkan sejauh mana pemangku kepentingan memahami tujuan dan maksud dari suatu program. Pemahaman yang baik akan mendukung kesuksesan program secara keseluruhan.
- b. Ketepatan Sasaran: Mengukur sejauh mana program atau kegiatan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan mencapai sasaran menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi.
- c. Ketepatan Waktu: Menilai sejauh mana suatu program dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Keterlambatan atau kecepatan dalam mencapai tujuan dapat memengaruhi efektivitas.
- d. Pencapaian Tujuan: Merupakan penilaian terhadap pencapaian hasil akhir yang diinginkan dari suatu program.

Kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan mencerminkan tingkat efektivitas.

- e. Perubahan Nyata: Mengukur dampak nyata yang dihasilkan oleh suatu program. Apakah program tersebut mampu menciptakan perubahan positif yang diinginkan dalam lingkungan atau masyarakat yang menjadi target.

Dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut, evaluasi efektivitas tidak hanya mempertimbangkan hasil akhir tetapi juga melibatkan pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata yang dihasilkan selama proses pelaksanaan program. Hal ini memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendalam tentang sejauh mana suatu program atau kegiatan dapat dianggap efektif.

Berdasarkan uraian indikator-indikator diatas dalam menentukan tingkatan efektivitas suatu program bisa dilihat dari jumlah indikator yang terpenuhi, apabila keenam indikator diatas dapat dicapai maka tingkat efektivitasnya sangat tinggi dan sebaliknya apabila ada atau banyak indikator yang tidak terpenuhi maka suatu program dapat dikatakan pengaruh efektivitasnya.

2.3 Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH)

2.3.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah program dari pemerintah yang berbentuk pemberian uang secara tunai yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang

tergolong pada kategori masyarakat miskin atau pra sejahtera, Adapun tujuan pemerintah menyalurkan dana BLT adalah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Iping, 2020).

Dana Bantuan Langsung tunai (BLT) bukanlah bentuk penyelesaian jangka panjang dalam menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi merupakan penyelesaian jangka pendek yang bertujuan agar rumah tangga miskin (RTM) atau masyarakat miskin dapat terhindar dari tindakan seperti menjual aset yang dimilikinya, putus sekolah, dan mengurangi konsumsi makanan yang sehat dan bergizi (Akmel, 2018)..

Program bantuan langsung tunai ini dibentuk supaya masyarakat yang telah dikategorikan sebagai masyarakat miskin atau (RTM) dapat terhindar dari resiko-resiko sosial, serta dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka. Berdasarkan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, bantuan sosial memiliki beberapa jenis program yang telah pada saat ini.. Untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa kriteria-kriteria dalam menentukan siapa yang berhak untuk menerima bantuan tersebut.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan didanai melalui Dana Desa. Pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang

Pengelolaan Dana Desa. Selain itu, pelaksanaan BLT juga diatur melalui Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 yang membahas percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (Agustina & Hendra, 2021).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan didanai menggunakan Dana Desa. Pendanaan ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020, yang merupakan revisi kedua dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Regulasi ini menyediakan dasar hukum dan pedoman untuk pengelolaan dana dan pelaksanaan program di tingkat desa.

Poin utama yang diatur dalam regulasi tersebut mencakup:

- a. Sumber Dana: APBDesa menjadi sumber utama pendanaan BLT, dan sumber dana ini berasal dari Dana Desa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat di tingkat desa.
- b. Perubahan dan Revisi: PMK Nomor 50/PMK.07/2020 merupakan revisi kedua dari peraturan sebelumnya (PMK Nomor 205/PMK.07/2019). Revisi ini mungkin mencakup penyesuaian aturan, prosedur, atau alokasi dana untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan BLT.

Selain PMK, Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 juga turut mengatur pelaksanaan BLT. Instruksi tersebut mungkin mengandung pedoman lebih lanjut, strategi pelaksanaan, atau langkah-langkah khusus yang perlu diikuti oleh pemerintah desa dalam mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa.

Dengan demikian, regulasi ini menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan dan pelaksanaan BLT di tingkat desa. Ini termasuk sumber dana, revisi aturan, dan pedoman lebih lanjut melalui instruksi kementerian terkait. Hal ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program bantuan di tingkat desa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diinginkan oleh pemerintah.

2.3.2 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya (Utomo, 2014). PKH berada dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik dipusat maupun di daerah.

Dasar hukum untuk Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang membahas Program Keluarga Harapan. Program ini diperkenalkan oleh Pemerintah sejak tahun 2007 sebagai upaya khusus dalam

menanggulangi kemiskinan berbasis rumah tangga. Meskipun demikian, PKH tetap mengacu pada regulasi yang disebutkan sebelumnya (Mahmud et al., 2020).

Beberapa poin penting terkait regulasi tersebut meliputi:

- a. Penyelenggaraan PKH: Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 memberikan arahan tentang penyelenggaraan PKH. Ini mencakup proses pendaftaran peserta, mekanisme penyaluran bantuan, dan tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh keluarga penerima manfaat.
- b. Kriteria Penerima Manfaat: Regulasi ini kemungkinan menguraikan kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh keluarga agar dapat menjadi penerima manfaat PKH. Hal ini melibatkan penilaian tingkat kemiskinan dan kebutuhan khusus keluarga yang menjadi fokus program.
- c. Jumlah Bantuan dan Mekanisme Penyaluran: Peraturan tersebut mungkin juga membahas besaran bantuan yang diterima oleh setiap keluarga penerima manfaat, serta cara atau mekanisme penyalurannya. Ini mencakup ketentuan-ketentuan terkait pemantauan dan evaluasi agar program berjalan efektif.
- d. Perubahan dan Revisi: Seiring waktu, regulasi ini dapat mengalami perubahan atau revisi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas PKH. Hal ini dapat mencakup penyesuaian besaran bantuan, penambahan kriteria, atau

perubahan mekanisme penyaluran sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah memiliki kerangka hukum yang jelas untuk menjalankan PKH sebagai bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan berbasis rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menjadi kunci dalam menjamin keberlanjutan dan keberhasilan Program Keluarga Harapan.

Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik, (Modul Diklat PKH 2013). PKH merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena actor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik.

Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank. Program keluarga harapan (PKH) sebenarnya telah dilaksanakan diberbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash Transfer (CCT), yang diterjemahkan menjadi bantuan tunai bersyarat. Program ini “bukan” dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan

daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, (Modul Diklat PKH 2013).

Dapat disimpulkan bahwa Program keluarga harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

2.3.3 Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) terdapat kriteria yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan bahwa masyarakat berada pada kategori miskin. Menurut BPS, ada 14 kriteria dalam menentukan keluarga rumah tangga miskin sebagai berikut (Ardiansyah, 2018):

1. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, kayu tidak berkualitas, bambu.
2. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
3. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau digunakan bersama-sama dengan rumah tangga lain.
4. Sumber penerangan pada rumah tidak menggunakan tenaga listrik.

5. Sumber air minum berasal dari air sumur, mata air tidak terlindung, sungai dan air hujan.
6. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah.
8. Hanya dapat mengonsumsi daging, susu, ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya dapat membeli satu set pakaian baru setahun sekali.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak memiliki akses kesehatan, tidak sanggup membiayai pengobatan.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000, - per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah atau tidak tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Sasaran PKH diperuntukkan bagi keluarga yang miskin dan rentan terhadap risiko sosial yang terdaftar dalam BDT penaganan

fakir miskin yang memenuhi komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang tinggal di wilayah pesisir/pulau kecil, daerah terpencil, dan perbatasan antar negara. Penjelasan kriteria komponen dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Komponen dan Kriteria Penerima PKH

No	Komponen	Kriteria
1	Kesehatan	• Ibu hamil dan Ibu menyusui
2	Pendidikan	• Anak SD atau sederajat, Anak SMP atau sederajat dan Anak SMA atau sederajat • Anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
3	Kesejahteraan	• Lanjut usia \geq 60 tahun • Penyandang disabilitas berat

Sumber: Mensos, 2018.

Bantuan yang diberikan pemerintah kepada penerima PKH berbeda beda tergantung pada komponen suatu KK. Berikut adalah indeks bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdapat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Indeks bantuan penerima PKH

No	Komponen Bntuan	Indeks Bantuan
1	Bantuan Tetap Reguler	Rp 550.000
2	Bantuan Tetap Wilayah PKH Akses	Rp 1.000.000
3	Bantuan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 2.400.000
4	Bantuan Kesehatan Anak Usia 0 s/d 6 tahun	Rp 2.400.000
5	Bantuan Pendidikan SD/MI Sederajat	Rp 900.000
6	Bantuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat	Rp 1.500.000
7	Bantuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat	Rp 2.000.000
8	Bantuan Kesejahteraan Sosial Usia Lanjut	Rp 2.400.000
9	Bantuan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Berat	Rp 2.400.000

Sumber: Mensos, 2018.

2.3.4 Indikator Efektivitas PKH

Efektivitas dapat diukur melalui indicator keberhasilan pelaksanaan program bantuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berikut ini indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) (Khadafi, 2017):

1. Tepat Sasaran Penerima Program

Bantuan Program Keluarga Harapan hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang telah memenuhi persyaratan dan telah lolos verifikasi sesuai dengan petunjuk pengelolaan bantuan dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu:

- a. Pendidikan
- b. Lansia
- c. Ibu Hamil
- d. Penyandang Disabilitas

2. Tepat Sosialisasi Program

Sosialisasi Program menjadi salah satu pendorong untuk efektivitas Program Keluarga Harapan sesuai dengan perencanaan.

3. Tepat Tujuan Program

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat di raih dengan ketepatan tujuan program pada pelaksanaannya. Penggunaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dipergunakan sesuai dengan komponen yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi lansia dan disabilitas.

4. Pemantauan Program

Pemantau yang serius dan tepat dilakukan pendamping PKH bisa menjadi sebuah indikator dalam pencapaian efektivitas Program Keluarga Harapan.

2.3.5 Indikator Efektivitas BLT

Efektivitas dapat diukur melalui indicator keberhasilan pelaksanaan program bantuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berikut ini indikator keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai (Bawadi & Ratnasari, 2023):

1. Indikator masukan, merupakan langkah awal dari pemerintah dalam melaksanakan program BLT seperti sudah siapnya dana yang akan dibagikan.
2. Indikator proses, merupakan tindak lanjut dari indikator sebelumnya yaitu sudah tersedianya data yang akan menerima BLT.
3. Indikator Keluaran, merupakan kegiatan penyaluran dana BLT kepada penerima.
4. Indikator manfaat, merupakan kegiatan menganalisis penggunaan dana oleh masyarakat yang menerima dana BLT.
5. Indikator dampak, merupakan hasil dari kebijakan BLT. Apabila jalannya telah sesuai dengan rencana yang dibuat maka kebijakan ini bisa dikatakan efektif. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dikatakan efektif apabila semua indikator berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

2.4 Kemiskinan

2.4.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi apa yang ia butuhkan secara mendasar. Ketidakmampuan selain kebutuhan dasar bukan termasuk kemiskinan (Al-Ghazali 2015). Secara etimologi kemiskinan pada prinsipnya adalah suatu keadaan tidak memiliki harta, aset atau kondisi hidup yang serba kekurangan serta memiliki pendapatan yang sangat rendah. Dalam bahasa Arab, kemiskinan dilambangkan dengan kata *Almiskin* atau *Al-faqr* yang berarti keadaan membutuhkan. Dan *faqr* adalah seseorang yang memiliki sedikit makanan pokok. Sedangkan kata *al-miskin* mengacu pada orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya.

Kemiskinan dalam perspektif Islam dikategorikan dalam dua golongan yaitu fakir dan miskin. Fakir adalah keadaan seseorang dimana ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Ia tidak mampu melakukan usaha apapun seperti cacat dan orang lanjut usia. Sedangkan miskin adalah suatu kondisi seseorang yang memiliki kemampuan untuk mencari nafkah tetapi pendapatannya masih tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan dasarnya (Chaniago, 2015).

Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah tingkat kesejahteraan yang rendah di sektor ekonomi. Tingkat kesejahteraan yang rendah menandakan bahwa tingkat produktivitasnya juga

rendah. Produktivitas yang rendah mengindikasikan kurangnya pemanfaatan sumber daya dengan optimal. Para ahli menyimpulkan ada tiga penyebab kemiskinan yaitu keterbatasan sumber daya, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya akses modal (Robimadin, 2020).

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar nyu *basic needs* secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan (BPS, 2016). Kemiskinan merupakan fenomena yang sudah tidak asing dalam kehidupan masyarakat. Pengertian dan ukurannya relatif berbeda sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Dalam pemerintahan di berbagai negara menetapkan kemiskinan sebagai suatu isu strategis yang harus dientaskan dari kehidupan masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, tidak hanya dari sisi materi melainkan juga psikologi, sosial, dan spiritual. Dalam menyikapinya negara dan masyarakat memiliki kewajiban dalam membantu dan menjamin kehidupan yang layak.

Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar memiliki permasalahan sosial yang ada di semua lapisan masyarakat. Masalah sosial yang dimaksud adalah kemiskinan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja (Akib dan Risfaisal, 2016). Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di

negara maju, bahkan dalam kondisi yang sangat genting. Sugiyarto, Mulyo dan Seleky (2015) berpendapat bahwa mayoritas penduduk miskin di negara berkembang dan negara maju pada umumnya tinggal di pedesaan dan sebagian lagi di perkotaan dimana masyarakatnya berasal dari pedesaan dengan harapan taraf hidupnya kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya.

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia pada tahun 2015, sekitar 14,09 persen penduduk yang tinggal di pedesaan termasuk dalam kategori masyarakat miskin, sedangkan di perkotaan, sekitar 8,22 persen termasuk dalam kategori miskin. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penduduk yang tinggal di pedesaan memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan (BPS, 2016).

2.4.2 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan akan memudahkan analisis pola penanggulangan kemiskinan, baik sebagai upaya preventif maupun perbaikan. Kemiskinan harus dipetakan berdasarkan kriteria dan kajian yang mendalam. Dengan demikian. Maka lahirlah kriteria-kriteria kemiskinan dari beberapa lembaga, misalnya menurut Badan Pusat Statistika (BPS) dengan memperhatikan terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic need*), terdapat beberapa indikator dalam menentukan kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dasar yaitu sandang, pangan dan papan.
2. Tidak ada akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi.
3. Tidak adan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Rentan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massa.
5. Rendahnya kualitas SDM dan SDA.

Begitu juga dengan tokoh ekonomi islam yang juga memiliki cara dalam melihat kemiskinan seseorang. Dengan berdasarkan al-Quran dan hadits pemikir ekonomi Islam mengemukakan indikator-indikator kemiskinan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kebutuhan Primer

Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Bagi banyak ekonom, kepuasan maksimum dari kebutuhan ini memastikan jalan hidup yang baik. Menurut Taqiyuddin an-Nabani, kebutuhan utama meliputi sandang, pangan dan papan yang cukup. Indikator kebutuhan primer juga berdasarkan hadits. Rasulullah saw. Bersabda: *Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan* (HR. Ibnu Majah).

2. Berdasarkan Kebutuhan Pokok Materi dan Spiritual

Berdasarkan pemikiran Irfan Syauqi Beik tidak jauh berbeda dengan indikator maqashid syariah, karena pemikirannya mengacu

pada konsep Maqashid Syariah. Ini juga menjelaskan metode pengujian kemiskinan. Mengenai visinya tentang kemiskinan, ia membagi menjadi tiga kebutuhan dasar manusia, yaitu dapat beribadah, memiliki cukup sandang, pangan dan papan, dan tidak adanya takut, Hal ini berdasarkan pada surah Thaha ayat 118-119:

إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

Artinya:

“Sungguh ada (jaminan) utukmu di sana, engkau tidak kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari” (QS-Thaha ayat 118-119).

Pada ayat ini menjelaskan bahwa ketika Adam tinggal di surga (dan tidak tergoda oleh iblis) maka kehidupannya tidak akan mengalami kesusahan. Segala kebutuhannya telah Allah *siapkan*. Pangan melimpah dan lezat sehingga kamu tidak akan lapar, pakaian tersedia beraneka ragam, aneka suguhan yang berbentuk cair sehingga kamu tidak akan kehausan, cahaya matahari yang sejuk dan nyaman karena rimbunnya daun-daun kayu. Sehingga panas juga tidak akan melukaimu seperti berada di dalam rumah yang berada di bumi (Tafsir almunir).

3. Garis Batas Nishab

Batas nishab merupakan indikator ekonomi Islam dengan melihat kemiskinan. Para pemikir Islam berpendapat bahwa garis nishab berperan dalam menentukan kaya atau miskin seseorang.

Skema Islam tentang zakat menjadi acuan nya. Jika harta yang dimiliki seseorang *dalam* satu tahun mencapai nishab (setara dengan 94 gram emas) maka orang tersebut tergolong kaya dan wajib mengeluarkan zakat, begitu pula sebaliknya berlaku bagi yang menerima zakat.

Dalam fiqh istilah miskin disebut Faqir atau Dhuafa. Miskin menurut ulama fiqh adalah:

1. Faqir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab zakat yaitu kurang dari 200 dirham (595 gram emas, 1 dirham =2,975 emas di luar dari kebutuhan pokoknya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta tumbuh apapun dan keadaannya lebih buruk dari orang faqir.
2. Faqir menurut Imam Syafii adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai harta yang dapat tumbuh sedangkan orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang dapat tumbuh tapi mereka tidak dapat hidup layaknganya dengannya.
3. Faqir adalah orang yang tidak cukup memiliki makanan pokok selama sebulan-setahun, sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak punya harta apapun yang dapat tumbuh.
4. Faqir adalah orang yang membutuhkan dan meminta pada orang lain sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak mau meminta walaupun mereka membutuhkan harta tersebut

Dari Empat unsur itu definisi kemiskinan bisa disimpulkan bahwa miskin menurut fiqh adalah orang yang tidak mempunyai

kebutuhan pokok, pakaian, kelangsungan hidup lama dan ketahanan sosial. Miskin juga dikarenakan tidak adanya ketersediaan material bagi manusia untuk bertahan hidup lama. Islam memberikan gambaran bahwa orang miskin harus mendapatkan perlindungan baik secara materi maupun agama. Agama mewajibkan setiap umatnya untuk bersedekah dan mengeluarkan zakat untuk kepentingan umat dan masyarakat terlebih dahulu untuk orang miskin secara harta. Menurut Fiqh ada dua tuntutan terhadap manusia untuk memberikan perlindungan yaitu perlindungan terhadap jiwa manusia dan kemanusiaan. Kedua, perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan.

Pandangan Islam terhadap kemiskinan merupakan hal yang dapat membahayakan akhlak, keluarga, masyarakat, dan kelogisan berpikir. Dalam pandangan Islam miskin dan kaya bukanlah ukuran seseorang hina atau mulia karena pada dasarnya kemiskinan maupun kekayaan merupakan ujian bagi setiap orang muslim. Suatu keadaan di mana manusia yang sangat butuh karunia dari Allah SWT tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT merupakan makna kemiskinan dalam Islam (Ridwan, 2011). Dalam pandangan Islam, kemiskinan merupakan bentuk ujian hidup yang harus dihindari dengan kemampuan dan potensi yang ada. Sabar, tawakkal, serta dibarengi usaha untuk melepaskan diri darinya merupakan cara menghadapi kemiskinan jika tetap terjadi dalam kehidupan.

2.4.3 Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Standar manusia miskin selalu berubah dan tergantung dimana kondisi dan waktu. Manusia miskin saat ini masih bisa makan, beli baju dan kebutuhan pokok, tetapi mereka tidak punya pendapatan tetap dan pekerjaan yang bisa menghasilkan ekonomi secara teratur. Kondisi ini dialami semua negara, karena negara harusnya menjamin pekerjaan dan pendapatan penduduknya. Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu baru mencoba untuk memberikan kontribusi kepada kemiskinan negara yang tidak bisa diselesaikan oleh teori ilmu ekonomi klasik dengan mengandalkan sistem Kapitalisme ekonomi.

Ekonomi Islam memandang kekayaan alam dan kekayaan SDM harus dilakukan atau diinvestasikan untuk kepentingan manusia pada masa depan, bukan untuk diperjual belikan. Islam menganjurkan manusia untuk berinvestasi, berdagang dan berbisnis, bukan untuk menjadi buruh dan pekerja kasar. Islam juga memudahkan segala sumber rejeki baik dari sumberdaya alam, maupun dari sumber daya manusia, karena pada hakikatnya rejeki dan kekayaan itu datangnya dari Allah bukan karena manusia. Ekonomi justru mendorong agar manusia bersikap rendah hati, tawadlu', kerja keras, tidak boros dan menjauhi perbuatan buruk yang menyebabkan kemiskinan. Seseorang yang ingin kaya harus menghindari dari perbuatan dhalim dan ketidakberdayaan, mengurangi perbuatan jelek dan memperbaiki perbuatan baik. Oleh

karena itu, ekonomi Islam menganjurkan agar kemiskinan terhindar, maka ada dua langkah yang harus dilakukan yaitu (Maulana, 2020):

1. Mengembangkan Sumberdaya manusia untuk kepentingan masa depan kehidupan, termasuk sumberdaya alam.
2. Mengharuskan manusia mentaati aturan Allah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Sunah, dimana aturan tersebut menjadikan manusia bahagia di dunia dan akhirat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, banyak kita temui kalimat Iman, taqwa, syukur, dhalim dan kufur. Kemurahan dan kekayaan akan kita peroleh jika kita berbuat baik terhadap Allah dan menjalankan aturan Allah. Sehingga, kita terhindar dari perbuatan maksiat, kekufuran dan kemiskinan nikmat. Ekonomi Islam menganjurkan agar manusia rajin bekerja, rajin mencari kemakmuran dan menjauhi sikap monopoli (Hamdani, 2015). Unsur utama dalam ekonomi Islam mencapai derajat kaya adalah pertama, memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan SDM untuk masa depan. Kedua, memiliki sikap jujur, adil dan tidak boros dalam menjalani hidup sehingga kita bisa kaya. Ketiga, berinvestasi dengan cara berdagang, bisnis, dan jual beli secara halal, juga suka berderma untuk kepentingan umum agar bisa mengurangi kemiskinan. Keempat, menghindari transaksi yang bernuansa ribawi dan bunga, karena akan menyengsarakan peminjam.

2.4.4 Indikator Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dengan berdasarkan al-Quran dan hadits pemikir ekonomi Islam mengemukakan indikator-indikator kemiskinan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kebutuhan Primer

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar manusia. Bagi sebagian banyak pemikir ekonomi memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan ini akan menjamin proses kehidupan yang baik. Menurut *Taqiyuddin an-Nabani*, di antara kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan secara layak (Ismail, 2020). Pemikiran ini berlandaskan ayat al-Quran sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.. (QS. Al-Baqarah ayat: 233).

2. Berdasarkan Kebutuhan Pokok Materi dan Spiritual

Sekilas pemikiran dari Irfan Syauqi Beik ini tidak jauh berbeda dengan indikator berdasarkan Maqashid Syariah, karena pemikirannya mengacu pada konsep Maqashid Syariah. Yang menarik adalah ketika ia tidak hanya menguraikan indikator kemiskinan melainkan juga metode untuk melihat kemiskinan.

2.5 Penelitian Terkait

Dalam penelitian ini digunakan tinjauan pustaka yang mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai dasar penelitian dan bahan kajian dari penelitian yang dilakukan.

Pertama, pada tahun (2016) penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Nugroho dengan judul “Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur, syarat dan kriteria masyarakat yang berhak untuk menerima dana BLT tersebut yang diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi yang diberikan masih belum merata. Kemudian dalam pengawasan program ini juga berjalan kurang baik dimana belum adanya kerjasama antara berbagai pihak, sehingga masih ada data yang diperoleh berbeda dengan yang ada di lapangan. Hal ini mengakibatkan program ini menjadi tidak tepat sasaran.

Kedua, pada tahun (2018) penelitian yang dilakukan oleh Hafidudin M dengan judul “Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang”. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi dana desa untuk pengentasan kemiskinan di desa Jambangan, kecamatan Bawang,

provinsi Batang. Kajian ini berfokus pada implementasi dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan metode analisa deskriptif, Melalui analisis data hasil penelitian ini diketahui bahwa: Implementasi dana desa sudah berjalan dengan baik, dilihat dari prosesnya ini sesuai petunjuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pedoman Buku Saku Dana Desa. Hal ini karena pelaksanaan dana desa sudah melalui tahap perencanaan, musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, pembuatan peraturan desa, pelaksanaan dan pelaporan ke gubernur

Ketiga, pada tahun (2018) penelitian yang dilakukan oleh dengan judul Samud “Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam”. Kemiskinan dan kebodohan ini menjadikan Indonesia Negara yang sedang mencari berbagai solusi dari gerbang pencerahan. Karena kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan, dan juga papan tak lepas dari kewajiban Negara untuk memenuhinya. Untuk hal ini, Negara harus bersedia membuka berbagai peluang (kerja, program pengentasan kemiskinan, dan lain-lain). Jika tidak terpenuhi maka Indonesia menyimpan berbagai potensi penyakit social yang berdampak pada Negara anarkis. Dengan demikian, kehadiran pihak ketiga menjadi sangat penting untuk menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan komunikasi yang berimbang dalam kaitannya terhadap pengembangan Negara bangsa dan masyarakat. Dengan hadirnya sebuah program untuk

mengentaskan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat melalui berbagai macam bantuan social yang berhasil mengurangi angka kemiskinan.

Keempat, pada tahun (2019) penelitian yang dilakukan oleh Nizare M dengan judul “Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017”. Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan belum mampu memberikan dampak besar, sehingga tujuan dari pembangunan nasional terkait masalah pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah berkepanjangan. Oleh karena itu pemerintah meluncurkan program Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang terdapat di Kecamatan Suralaga ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian diketahui, dalam pelaksanaannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Kecamatan Suralaga bertujuan untuk memberikan bukti nyata dalam pencapaian tujuan. Hasil Evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Kelima, pada tahun (2019) penelitian yang dilakukan oleh Nasution dengan judul “Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota”. Berdasarkan

hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan Walaupun Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat berbagai macam hambatan – hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. adanya ketidak transparan dalam pemilihan penerima bantuan dengan masyarakat, masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan rumah layak huni dan kurang tepatnya waktu dalam program pembangunan rumah bantuan layak huni.

Keenam, pada tahun (2021) penelitian yang dilakukan oleh Arumdani et al dengan judul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo”. Pandemi COVID 19 yang melanda dunia menyebabkan pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mengatasi penyebaran virus dan menangani dampak yang ditimbulkan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat yang terdampak COVID 19 adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Adanya sistem tebang pilih oleh perangkat desa menyebabkan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo ini ditemukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojoruntut yang belum pernah dilakukan oleh

para peneliti sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas dari pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojoruntut serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi desa mojoruntut dalam memberikan pelayanan publik.

Ketujuh, pada tahun (2021) penelitian yang dilakukan oleh Firdaus et al dengan judul “Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oi Tui Pada Masa Pandemi Covid-19 di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa di Desa Oi Tui yaitu sebanyak 60 KPM. BLT Dana desa memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Oi Tui, karena jumlah uang yang diterima dinilai kecil. Penggunaan uang tersebut memang dipakai untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Pemerintah Desa Oi Tui dalam menyalurkan BLT Dana desa sudah sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat walaupun ada beberapa non tekhnis.

Kedelapan, pada tahun (2021) penelitian yang dilakukan oleh Fiolita dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Banjarmasin”. Adapun tujuan penelitian ini yakni Untuk Mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Banjarmasin, Mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian dalam pelaksanaan PKH ditentukan enam tahap seperti penetapan sasaran, penetapan lokasi, pertemuan awal serta validasi, penyaluran bantuan, pembentukan kelompok dan pemutakhiran data. Selain itu dalam proses efektivitas PKH memenuhi beberapa tahapan seperti efektivitas, efisiensi, edukasi, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Kesembilan, pada tahun (2021) penelitian yang dilakukan oleh Sofi dengan judul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa”. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas pelaksanaan BLT Desa dari aspek peraturan, fungsi dan tugas, rencana dan hasil dapat berjalan dengan sangat efektif. Hal ini juga dapat kita lihat dari hasil pembagian antara outcome dengan output pelaksanaan BLT Desa yang menunjukkan angka 114,93 persen. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain adanya keterbatasan anggaran Dana Desa untuk BLT Desa, ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan termasuk penerima BLT Desa dan ketersediaan infrastruktur penyaluran.

Kesepuluh, pada tahun (2022) penelitian yang dilakukan oleh Sitepu dengan judul “Analisis Bantuan BLT dan PKH untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari Ekonomi Islam”. Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa bantuan BLT dan PKH memang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan anak sekolah namun masyarakat yang mendapatkan dana BLT dan PKH ini belum dapat dikatakan sejahtera, hal tersebut disebabkan manfaat yang diterima sangatlah kecil dan masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil dari manfaat tersebut dan pemenuhan kebutuhan. dan pemenuhan kebutuhan menurut pandangan ekonomi Islam, yaitu al-Shatibi pemenuhan kebutuhan terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat (bersifat pokok dan mendasar), kebutuhan hajiyyat (bersifat kebutuhan sebagai pelengkap), dan kebutuhan tahsiniyyat (bersifat penyempurna) dimana pelaksanaannya bantuan pemerintah yaitu BLT dan PKH sudah sesuai dengan Tingkat kebutuhan dalam ekonomi islam.

Untuk memudahkan dalam melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Penelitian Terkait

No	Nama/Tahun/Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Arumdani (2021) Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas dari pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojoruntut serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi desa mojoruntut dalam memberikan pelayanan publik.
2	Firdaus (2021) Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oi Tui Pada Masa Pandemi Covid-19 di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah.	Kualitatif deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian bahwa jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa di Desa Oi Tui yaitu sebanyak 60 KPM. BLT Dana desa memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Oi Tui, karena jumlah uang yang diterima dinilai kecil
3	Fiolita (2021) Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Banjarmasin	Penelitian lapangan yang bersifat deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PKH ditentukan enam tahap seperti penetapan sasaran, penetapan lokasi, pertemuan awal serta validasi, penyaluran bantuan, pembentukan kelompok dan pemutakhiran data. Selain itu dalam proses efektivitas PKH memenuhi beberapa tahapan seperti efektivitas, efisiensi, edukasi, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Tabel 2.3-Lanjutan

No	Nama/Tahun/Judul	Metode Penelitian	Hasil
4	Hafiudin M (2018) Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dana desa sudah berjalan dengan baik, dilihat dari prosesnya ini sesuai petunjuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pedoman Buku Saku Dana
5	Kusuma Nugroho (2015) Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur, syarat dan kriteria masyarakat yang berhak untuk menerima dana BLT tersebut yang diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi yang diberikan masih belum merata.
6	Nasution (2019) Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota	Kualitatif deskriptif	Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan Walaupun Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat berbagai macam hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tabel 2.3-Lanjutan

No	Nama/Tahun/Judul	Metode Penelitian	Hasil
7	Nizar M (2019) Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian diketahui, dalam pelaksanaannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Kecamatan Suralaga bertujuan untuk memberikan bukti nyata dalam pencapaian tujuan. Hasil Evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami peningkatan.
8	Samud (2018) Peranan Pemerintah dalam Menyejahterakan Masyarakat melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian di simpulkan bahwa kehadiran pihak ketiga menjadi sangat penting untuk menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan komunikasi yang berimbang dalam kaitannya terhadap pengembangan Negara bangsa dan masyarakat.
9	Sitepu (2022) Analisis Bantuan BLT dan PKH untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari Ekonomi Islam	Pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bantuan BLT dan PKH memang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan anak sekolah namun masyarakat yang mendapatkan dana BLT dan PKH ini belum dapat dikatakan sejahtera, hal tersebut disebabkan manfaat yang diterima sangatlah kecil dan masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil.

Tabel 2.3-Lanjutan

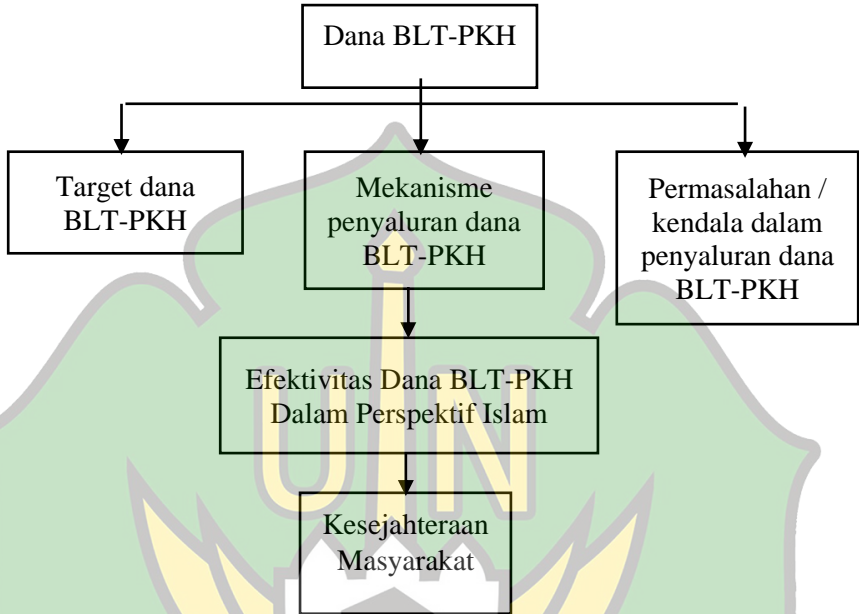
No	Nama/Tahun/Judul	Metode Penelitian	Hasil
10	Sofi (2021) Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa	Kuantitatif	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas pelaksanaan BLT Desa dari aspek peraturan, fungsi dan tugas, rencana dan hasil dapat berjalan dengan sangat efektif. Hal ini juga dapat kita lihat dari hasil pembagian antara outcome dengan output pelaksanaan BLT Desa yang menunjukkan angka 114,93 persen

Sumber: Data diolah, 2022.

2.5 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini telah dijelaskan mengenai efektifitas penyaluran dana PKH-BLT terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah, 2022

Gambar dari skema 2.1 menjelaskan bagaimana efektivitas penyaluran dana BLT-PKH terhadap kesejahteraan masyarakat, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu target dari dana BLT-PKH kemudian bagaimana mekanisme penyaluran dana BLT-PKH yang kemudian nanti dilakukan evaluasi mengenai permasalahan dalam penyaluran dana tersebut. Selanjutnya melihat efektivitas dana BLT-PKH dari perspektif Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara menelaah literatur kepustakaan, dan data resmi dari wawancara dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Penelitian diarahkan untuk mendapatkan data serta fakta yang berhubungan Efektivitas Program Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dan PKH (Program Keluarga Harapan) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana masalah akan di pecahkan (aplikatif) atau dimana tempat di ujikan (Suliyoto, 2017). Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah desa Lamgugob, kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh.

3.3 Sumber Data

Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal. dan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi (mamik, 2015). Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara maupun lewat data dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi, wawancara dan kuisioner (Rukajat, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Purposive sampling untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun yang menjadi informan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam program BLT-PKH di desa Lamgugob Kota Banda Aceh.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber penelitian yang didapatkan secara tidak langsung melalui media perantara (Hamni 2016). Data sekunder biasanya dalam bentuk dokumentasi atau laporan-laporan yang tersedia. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah beberapa foto kegiatan di mana para tenaga perempuannya bekerja, buku-buku referensi pendukung penelitian ini serta melalui kajian-kajian yang tentu saja berhubungan dengan judul dan tema yang diteliti.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1 Subjek Penelitian

Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian ini dilakukan adalah pihak-pihak yang terlibat pada program BLT dan PKH di desa Lamgugob. Teknik dengan wawancara yang peneliti

lakukan, memilih wawancara mendalam dengan informan yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti agar prosesnya sesuai dan berjalan secara ilmiah. Data mengenai klarifikasi responden dapat disajikan dalam table berikut ini: Adapun Pihak-pihak yang akan diwawancarai sebanyak 13 (tiga belas) orang responden, yaitu:

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

Jenis Informan	Keterangan Informan	Jumlah
Informan Kunci	Dinas Sosial	1
	Aparatur Desa	3
Informan Utama	Penerima PKH	30
	Penerima BLT	78
Akademisi	Akademisi	2
Total		106

Sumber: Data diolah, 2022.

3.4.2 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah berhubungan Efektivitas Program Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dan PKH (Program Keluarga Harapan) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lamgugob. Objek penelitian ini mencatat dan mengumpulkan informasi terkait BLT dan PKH yang diedarkan ke masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat Desa Lamgugob.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, sumber dan pengaturan. Dalam penelitian

perolehan data sangat luas serta mendalam, maka perlu diklasifikasikan upaya yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Wawancara ini dilakukan oleh penulis kepada masyarakat Desa Lamgugob Kota Banda Aceh agar memperoleh data objektif mengenai berhubungan Efektivitas Program Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dan PKH (Program Keluarga Harapan) yang di edarkan ke masyarakat, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepadapihak yang berkaitan, akan segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan penulisan.

3.5.2 Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung kepada masyarakat di Desa Lamgugob Kota Banda Aceh, terutama yang menyangkut dengan berhubungan Efektivitas Program Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dan PKH (Program Keluarga Harapan) dalam mensejahterakan masyarakat Desa Lamgugob.

3.5.3 Dokumentasi

Yaitu penulis mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis (buku, brosur, majalah), perpustakaan atau instalasi lain yang dapat dijadikan analisa dalam penelitian lain yang berhubungan dengan berhubungan Efektivitas Program Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dan PKH (Program Keluarga Harapan) yang di dearkan dalam perspektif Islam.

3.6 Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2019) instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh seorang peneliti dalam proses pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah.

Tabel 3.2
Pengukuran Efektivitas

No	Indikator	Alat ukur
1	Ketepatan Penentuan waktu	Berapa lama rentan waktu yang dibutuhkan untuk penyaluran dana BLT dan PKH?
2	Ketepatan Perhitungan Biaya	Bagaimana mekanisme perhitungan atau penetapan anggaran BLT dan PKH?
3	Ketepatan dalam pengukuran	Bagaimana standar yang ditetapkan dalam menjalankan program BLT dan PKH?
4	Ketepatan dalam menentukan tujuan	1. Apa saja tujuan yang hendak dicapai pada program BLT dan PKH? 2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan?
5	Ketepatan sasaran	1. Se jauh mana ketepatan sasaran yang dapat dijamin oleh aparat desa? 2. Se jauh mana keberhasilan pada program BLT?

Sumber: Data diolah (2022).

Tabel 3.3
Pengukuran Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

No	Indikator	Alat ukur
1	<i>Al- dien</i> (agama)	Bagaimana pengaruh BLT dan PKH terhadap shalat, puasa, zakat. dan haji?
2	<i>Al- nafs</i> (Jiwa)	Bagaimana Pengaruh BLT dan PKH terhadap jiwa dan raga?
3	<i>Al- 'aql</i> (akal)	Bagaimana Pengaruh BLT dan PKH terhadap akal pikiran (kebutuhan pendidikan)?
4	<i>An- nasb</i> (keturunan)	Bagaimana Pengaruh BLT dan PKH terhadap penjagaan keturunan meliputi nasab dan pernikahan?
5	<i>Al- mal</i> (harta)	Bagaimana Pengaruh BLT dan PKH terhadap penjagaan harta (pendapatan)?

Sumber: Data diolah (2022).

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah penelitian dan hasil datanya sudah terkumpul, maka peneliti memuat data sesuai fokus penelitian, mereduksikan data, menyajikan data sampai akhirnya menarik kesimpulan. Proses analisis data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut uraikan sesuai dengan pembahasan (Fadhli, 2018). Pada langkah ini, data yang dihasilkan dari penelitian, baik dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, maupun data sekunder yang meliputi dokumentasi akan di olah sesuai fakta yang di dapatkan di lapangan nantinya yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, di mana langkah ini peneliti berusaha memuat data hasil observasi dan wawancara dengan cara mengklarifikasi data agar tercapai konsistensi, dalam artian

peneliti hanya memuat data yang bersesuaian dengan fokus penelitian. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data, merangkum dan menganalisis melalui kajian konseptual, dalam hal ini peneliti merangkum masalah yang telah diperoleh, kemudian masalah tersebut dianalisis melalui teori ekonomi, khususnya dalam masalah pembangunan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Menarik kesimpulan, dimana langkah ini merupakan langkah terakhir dengan membuat suatu kesimpulan terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Yaitu: bagaimana efektivitas program BLT (Bantuan Langsung Tunai) terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lamgugob, bagaimana efektivitas program PKH (Program Keluarga Harapan) terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lamgugob dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap efektifitas program BLT dan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lamgugob Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat

Lamgugob merupakan salah satu gampong yang berada di kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, provinsi Aceh, Indonesia. lamgugob yang juga ibu kota kecamatan ini mempunyai tiga dusun yaitu dusun kaye'e Adang (Induk), Lamnyong dan Tunggai. lamgugob di pimpin oleh seorang Geuchik dan 3 kepala dusun ini mempunyai mesjid yang begitu indah dengan halaman yang luas. Dari cerita historis tokoh-tokoh gampong, Gampong Lamgugob sudah ada sejak zaman Pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Lamgugob pada masa itu merupakan gampong yang sudah maju dengan jumlah penduduk yang banyak dan termasuk dalam wilayah Mukim Kayee Adang. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya batu nisan yang berukir dari makam-makam yang sudah sangat lama.

Konon Penamaan Gampong Lamgugob terkait dengan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Dimana masyarakat gampong yang hidup dalam suasana tentram dan damai pada saat datang sekelompok tentara Belanda dan dikejutkan dengan munculnya seekor babi liar (bui). Orang-orang memperkirakan babi liar itu berasal dari sebuah gampong yang jauh yaitu Le Bui (artinya banyak babi) yang sekarang menjadi Labui yang masuk dalam wilayah Aceh Besar. Masuknya babi tersebut membuat hampir

semua penduduk gampong menjadi panik (bahasa Acehnya “gugob”), inilah yang kemudian menjadi nama gampong Lamgugob. Kata Lam diawal bermakna gampong atau desa.

Gampong Lamgugob dulunya merupakan wilayah pertanian, perkebunan, perikanan dan juga perdagangan. Masyarakat pada masa itu bermata-pencaharian sebagai petani sawah, petani tambak, petani kebun, dan sebagiannya adalah pedagang. Dahulunya di Lamgugob juga terdapat tenun tradisional yang sangat terkenal dikalangan kerajaan Aceh, yaitu kain tenun Lamgugob. Pada masa itu tenun Lamgugob (Ija Lamgugob) merupakan pakaian khusus bagi laki-laki yang diikatkan di pinggang di luar celana panjang gunanya adalah untuk kesopanan yaitu menutup selangkang celana yg digunakan. Namun sayang tenun Lamgugob kini tinggal kenangan.

Dahulunya gampong Lamgugob terdiri dari empat Dusun. Yaitu Dusun Kayee Adang, Dusun Peurada, Dusun Tunggai, dan dusun Lamnyong. Seiring perjalanan waktu, Dusun Peurada kini sudah menjadi Gampong definitif yang berdiri sendiri, sehingga di Lamgugob kini hanya tinggal tiga dusun saja. Sejak tahun 2016 Lamgugob mempunyai lima Ulee Jurong, yaitu: Ulee Jurong Kayee Adang Timu, Ulee Jurong Kayee Adang Barat, Ulee Jurong Tunggai Timu, Ulee Jurong Tunggai Barat, dan Ulee Jurong Lamnyong. Dana Desa mulai diterima di Gampong Lamgugob pada tahun 2015.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Gampong Lamgugob tahun 2022

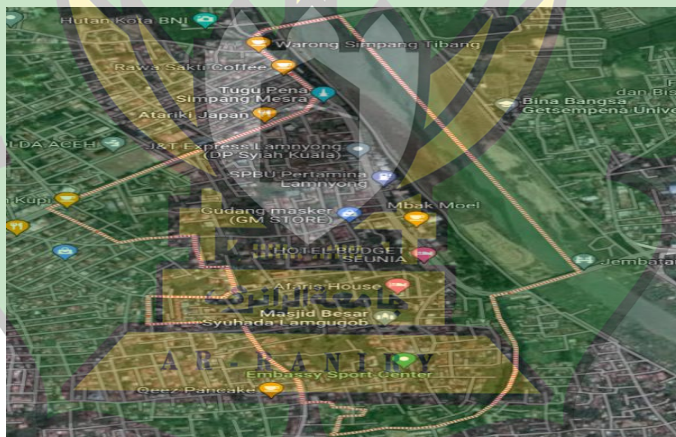
No	Dusun	Jumlah Jiwa
1	Dusun Kayee Adang	2.177 Jiwa
2	Dusun Lamnyong	514 Jiwa
3	Dusun Tunggai	2.370 Jiwa
Total		5.061 Jiwa

Sumber: Pemerintah desa Lamgugob (2022).

Jumlah penduduk gampong Lamgugob yang terbagi menjadi tiga dusun yaitu: Dusun Kayee Adang dengan 2.177 Jiwa, dusun Lamnyong dengan 514 jiwa, dan dusun Tunggai dengan 2.370 jiwa.

4.1.2 Letak Geografis

Gambar 4.1
Peta Desa Lamgugob



Data diolah, 2023

Gampong Lamgugob merupakan ibu kota Kecamatan Syiah Kuala dengan luas wilayah 102 Ha. Adapun batas-batas Gampong Lamgugob adalah sebagai berikut:

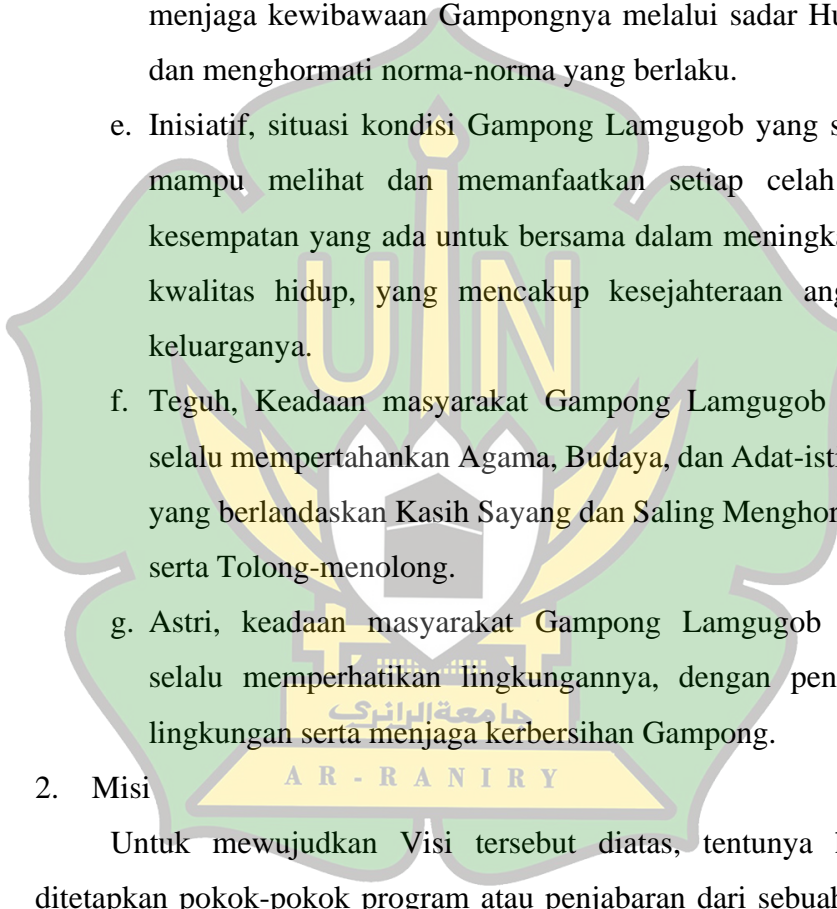
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Jeulingke.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Pineung dan Gampong Ie Masen Kayee Adang.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pineung dan Gampong Peurada.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Meunasah Papeun Aceh Besar.

4.1.3 Visi dan Misi Desa Lamgugob

1. Visi

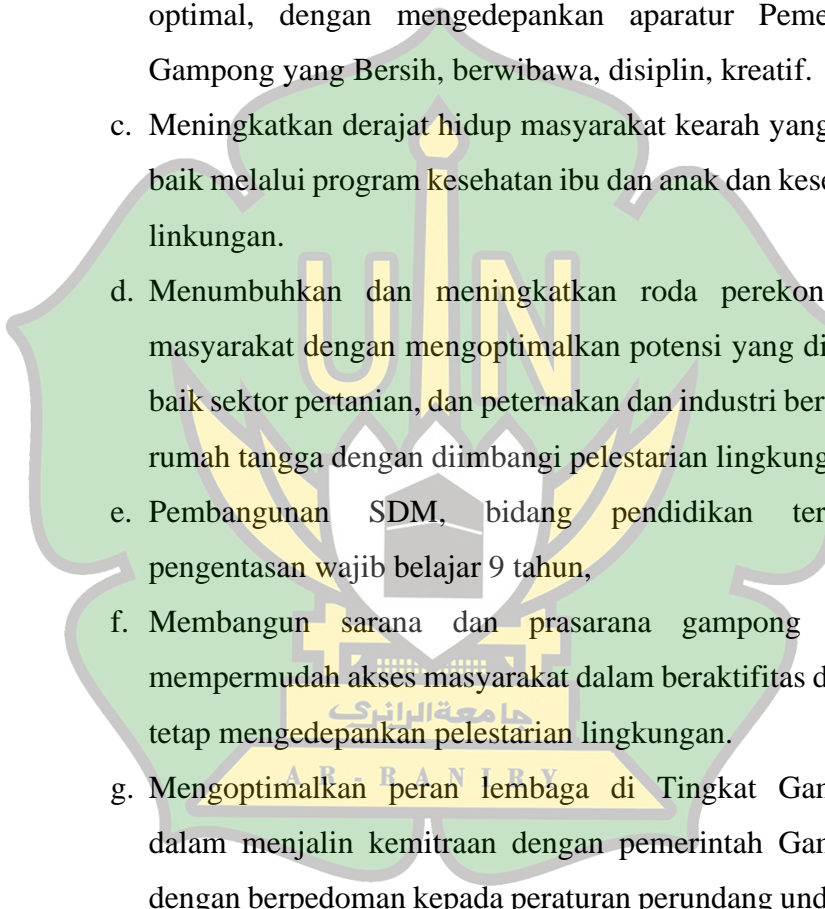
Terwujudnya gampong Lamgugob yang, “Satwita” sejahtera, aman, tertib, wibawa, inisiatif, teguh, asri.

- a. Sejahtera, suatu kondisi dimana masyarakat Gampong Lamgugob mampu mandiri, serta meningkatkan taraf hidup yang seimbang dan Kompetitif di segala aspek pembangunan.
- b. Aman, dimana keadaan dan kondisi Gampong Lamgugob yang mampu menangkal segala ancaman keamanan baik internal, maupun eksternal dengan meningkatkan Persatuan dan Kesatuan masyarakat Gampong.
- c. Tertib, kondisi masyarakat Gampong Lamgugob yang selalu menghormati segala norma dan aturan Perundangan yang berlaku, dengan selalu mengutamakan kepentingan umum dan orang banyak, serta masyarakat yang selalu mampu menghindari dari berbagai ancaman yang mengganggu ketertiban Gampong.

- 
- d. Wibawa, Pencerminan dan Implementasi dari sebuah Pemerintahan yang bersih, pelayanan terpadu dari Pemerintahan Gampong yang menjadi tauladan bagi masyarakat sehingga seluruh masyarakatpun selalu menjaga kewibawaan Gampongnya melalui sadar Hukum dan menghormati norma-norma yang berlaku.
- e. Inisiatif, situasi kondisi Gampong Lamgugob yang selalu mampu melihat dan memanfaatkan setiap celah dan kesempatan yang ada untuk bersama dalam meningkatkan kualitas hidup, yang mencakup kesejahteraan anggota keluarganya.
- f. Teguh, Keadaan masyarakat Gampong Lamgugob yang selalu mempertahankan Agama, Budaya, dan Adat-istiadat, yang berlandaskan Kasih Sayang dan Saling Menghormati, serta Tolong-menolong.
- g. Astri, keadaan masyarakat Gampong Lamgugob yang selalu memperhatikan lingkungannya, dengan penataan lingkungan serta menjaga kerbersihan Gampong.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, tentunya harus ditetapkan pokok-pokok program atau penjabaran dari sebuah visi dimaksud. Penjabaran visi dalam pokok-pokok program atau disebut dengan MISI agar lebih mudah dilaksanakan, dioperasionalkan, diimplementasikan sehingga bisa terukur nantinya. Adapun Program Pokok yang digariskan nantinya adalah:

- 
- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat Gampong dalam pelaksanaan Syari'at Islam secara Kaffah melalui berbagai program pendukung.
 - b. Menciptakan pelayanan masyarakat yang baik profesional, optimal, dengan mengedepankan aparatur Pemerintah Gampong yang Bersih, berwibawa, disiplin, kreatif.
 - c. Meningkatkan derajat hidup masyarakat kearah yang lebih baik melalui program kesehatan ibu dan anak dan kesehatan lingkungan.
 - d. Menumbuhkan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik sektor pertanian, dan peternakan dan industri bersekala rumah tangga dengan diimbangi pelestarian lingkungan.
 - e. Pembangunan SDM, bidang pendidikan terutama pengentasan wajib belajar 9 tahun,
 - f. Membangun sarana dan prasarana gampong untuk mempermudah akses masyarakat dalam beraktifitas dengan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan.
 - g. Mengoptimalkan peran lembaga di Tingkat Gampong dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah Gampong dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian tentang analisis efektivitas program BLT (bantuan langsung tunai) dan PKH (program keluarga harapan) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam (studi di desa Lamgugob). Dari hasil Wawancara, maka penelitian menjelaskan tentang implikasi-implikasi dari hasil penelitian antara lain sebagai berikut:

4.2.1 Efektivitas Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di desa Lamgugob

Efektivitas adalah adanya suatu tujuan yang telah tercapai tepat pada sasaran dengan adanya proses-proses kegiatan. Maka dalam hal ini peneliti meneliti tentang efektivitas program BLT ini terhadap masyarakat yang menerima manfaat. Untuk hal tersebut peneliti mewawancarai pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan program tersebut yaitu di desa Lamgugob. Pihak yang memiliki wewenang ini ditujukan kepada aparat desa dan masyarakat.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Rp. 600.000,- setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama tiga bulan pertama dan bebas pajak, dan RP. 300.000,- untuk setiap bulan kedepannya. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka kepala desa

dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa. Desa Lamgugob mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dan menurut Bapak Keuchik Amanullah Sag sebagai aparat Desa Lamgugob sekaligus penanggung jawab dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), aparat desa membagikan kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020.

Yang mendata Keluarga Penerima BLT dan PKH kita libatkan langsung perangkat desa langsung, setelah itu diundang dan melakukan verifikasi data. Data utama seperti foto copy Kartu Keluarga (KK), KTP, dan menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat yang sesuai dengan faktanya dan terjun langsung atau survei ke rumah-rumah warga yang diajukan namanya untuk di cek kebenarannya agar tidak salah sasaran (Wawancara dengan Amanullah Sag)”

Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini disalurkan kepada warga penerima bantuan mulai dari tahap pertama sampai telah mencapai tahap keempat. Pada tahap pertama masyarakat beranggapan bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah bantuan untuk seluruh masyarakat, untuk menghilangkan anggapan tersebut aparat desa memberi informasi kepada masyarakat bahwa dana BLT hanya untuk warga yang tidak

memiliki pekerjaan, dipecat atau di PHK karena dampak dari pandemi covid-19, tidak memiliki kebun, yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan BLT, dan lansia dengan cara Musyawarah Desa. Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Lamgugob tidak lepas dengan musyawarah yang juga sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Dengan adanya musyawarah ini masyarakat tidak lagi salah paham terkait dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH. Berikut uraian wawancara Ibu Soraya Lestari:

Untuk menghindari dan menimalisir tidak tepat sasaran adalah dengan bekerja sama dengan perangkat desa. Perangkat desa mengetahui secara baik karakteristik masyarakat desanya. Data penyaluran harus selalu diupdate oleh perangkat desa sebelum pembagian agar adanya pemerataan dan tepat sasaran. Karena setiap hari ada masyarakat yang meninggal, pindah, menikah karena itu semua akan merubah status ekonomi (Wawancara dengan Ibu Soraya Lestari).

Pada tahap kedua sampai saat ini penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan cara melalui rekening walaupun tahap pertama masih diberikan secara cash atau langsung dan berkumpul di balai desa Lamgugob. Mengingat adanya pandemi covid-19 pada saat itu atau mencegah kerumunan pemerintah desa berinisiatif untuk memberikan dana tersebut melalui rekening yang diberikan masing-masing penerima sampai saat ini.

Kontribusi Dana BLT dan PKH Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Lamugob adalah sebagai berikut:

Kemampuan materil keluarga dapat dipahami sebagai ketahanan ekonomi keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan, permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Ketahanan ekonomi keluarga memiliki beberapa variabel yang berpotensi mempengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga, diantaranya yaitu:

1. Tempat Tinggal Keluarga

Tempat tinggal keluarga merupakan salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi yang diukur dengan status kepemilikan rumah. Indikator ini dapat digunakan sebagai ukuran ketahanan ekonomi suatu rumah tangga karena rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri berarti dia telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk membangun keluarga dengan ketahanan keluarga yang lebih baik. Penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH di desa Lamugob untuk tempat tinggal sudah lebih baik karena tempat tinggal sudah milik sendiri walaupun rumah yang ditempati sederhana dan bervariasi ada yang dibangun dari papan dan sebagian sudah bangunan tembok. Dan ada beberapa keluarga penerima bantuan masih menumpang dengan orang tuanya seperti yang dikatakan oleh Haris Dahlan.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari hari sudah cukup untuk membeli kebutuhan pokok dan membiayai sekolah anak dari

dana BLT ini. Saya sekeluarga juga tinggal yang masih punya orang tua, ya istri saya hanya bisa membantu orang tua untuk jualan sarapan pagi selebihnya ya saya untuk mencari nafkah keluarga (Wawancara dengan Haris Dahlan).

2. Pendapatan Keluarga

Kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga yang akan diukur dengan indikator objektif dan indikator subjektif. Pertama, indikator objektif akan melihat kecukupan penghasilan dengan pendapatan perkapita rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Kedua, indikator subjektif akan melihat kecukupan rumah tangga berdasarkan persepsi kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah tangga yang mempunyai persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Dalam penelitian ini pendapatan keluarga melihat dari indikator subjektif yaitu melihat kecukupan rumah tangga berdasarkan persepsi kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan BLT pada masa pandemi covid-19 dan setelah masa pandemi dapat membantu mereka untuk menambah pendapatan dan mencukupi kebutuhan. Bapak Alkausar

Ini sudah sangat membantu kami, dan saya berharap dengan adanya program-program seperti ini akan bertambah lagi

program baru yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan (Wawancara dengan Bapak Alkausar).

Seperti halnya dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH kepada keluarga penerima bantuan, mereka menggunakannya sebagian untuk biaya tambahan modal usaha, kebutuhan sehari-hari serta ada juga untuk membayar utang.

3. Jaminan Keuangan Keluarga

Selain kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga tersebut dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sehingga kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan terhadap resiko tersebut diukur dengan variabel jaminan keuangan yang terdiri dari dua indikator, yaitu tabungan keluarga dan asuransi keluarga.

4.2.2 Efektivitas Program PKH (Program Keluarga Harapan) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di desa Lamgugob

Di Indonesia sejak 2004 telah diterbitkan undang-undang terkait perlindungan sosial, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam sistem jaminan sosial ini diakui bahwa setiap ini diakui bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang

layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat indonesia yang sejahterah, adil dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat indonesia, yang terdiri dari jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sedangkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial lebih banyak mengatur perlunya keberadaan Tenaga Kerja Sosial.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengembangan perlindungan sosial, pemerintah indonesia mulai tahun 2007 mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjuan untuk menaggulangi masalah kemiskinan demi terciptanya kesejahteraan. Program keluarga harapan ini memfokuskan tiga kategori/komponen yaitu:

1. pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak KPM)
2. kesehatan (meningkatkan kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita)
3. kesejahteraan sosial (penyandang disabilitas berat dan lansia diatas 70 tahun).

Program PKH sangat cocok di terapkan di indonesia, namun akan ada efek negatifnya juga karena dapat meningkatkan ketergantungan akan adanya bantuan tersebut sehingga menimbulkan rasa malas bekerja pada masyarakat kita (Wawancara dengan Soraya Lestari).

Menurut teori human capital kualitas sumber daya manusia rendah dari pendidikan dan kesehatan tidak menutup kemungkinan akan memicu kemiskinan. Oleh karena itu, hadirnya PKH ini mencoba untuk membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan. Program-program yang dilakukan oleh PKH meliputi, kegiatan kesehatan, maupun pendidikan dan kesejahteraan sosial, yang merupakan komponen penting dalam PKH, setiap program dan kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara umum oleh PPKH Pusat. Alur mekanisme PKH dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari pemilihan peserta kelompok, pertemuan kelompok, pembayaran verifikasi komitmen, pengukuhan atau pembatalan peserta PKH, pemuktahiran data, dan pengaduan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti PKH merupakan upaya efektif yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesehatan keluarga ibu hamil, balita serta rumah tangga penerima manfaat serta mengurangi beban hidup dan meningkatkan pendidikan serta mensejahterakan hidup penyandang disabilitas dan juga lansia di desa Lamgugob. Hal ini terbukti bahwa PKH, baik kesehatan pendidikan dan kesejahteraan sosial telah berjalan dengan cukup baik namun belum maksimal dalam artian masih banyak yang harus di koreksi dan tingkatkan baik itu dalam kinerja maupun sistem atau mekanisme dalam Implentasi Program Keluarga Harapan di kecamatan Syiah kuala khususnya desa Lamgugob, walaupun di

awal- awal masih terdapat proses adaptasi namun sekarang telah mengalami perkembangan yang cukup optimal.

Keberhasilan implementasi PKH patut di petahankan bahkan harus dikembangkan sehingga terdapat sinergisitas antara aspek pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial yang pada akhirnya PKH mampu mencapai tujuan serta indikator yang diharapkan oleh PKH.

1. Kelembagaan PKH:

- a. Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan PKH sebagai atasan yang membawahi Puskesmas dan Bidan Desa yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta PKH.
- b. Sosialisasi kepada peserta PKH diawal program oleh pendamping PKH.

2. Kepesertaan PKH:

- a. Data kepesertaan yang digunakan oleh PKH di desa Lamgugob berasal dari BPS Pusat dan dalam pengawasan perangkat desa agar tidak salah sasaran.
- b. Pengajuan peserta baru tidak dapat dilakukan karena pendataan hanya dapat dilakukan oleh BPS.
- c. Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi ibu hamil.

4.2.3 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Efektifitas Program BLT dan PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di desa Lamugob

Perlindungan Sosial merupakan hak asasi manusia, berlaku universal untuk terhadap ketidakmampuan penduduk miskin menghadapi risiko sosial. Jaminan Kesejahteraan Sosial telah menjadi komitmen nasional yang diamanatkan secara konstitual dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam paradigma Islam pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah kekuasaannya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber-sumber dana yang sah yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan sosial. Islam menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang di tanggulasi, diantara cara yang ditetapkan oleh islam dalam menaggulangi kemiskinan adalah himbauan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan. Bahkan menetapkan hak-hak bagi fakir miskin dalam harta orang kaya seperti zakat, shadaqah sunnah, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori pemaentukan jaminan sosial. Tanggung jawab pemerintah Indonesia pada rakyatnya tercermin pada di berlakukannya perlindungan sosial tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di negara ini.

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH kepada masyarakat desa yang sangat membutuhkan. Karena

program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH dari pemerintah disalurkan ke masyarakat desa melalui pemerintah desa dan dilaksanakan dengan baik. Upaya bantuan ini harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat tolong-menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH merupakan proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan ta'awun, pemerintah pusat, daerah, desa dan masyarakat saling bahu-membahu dalam kepedulian masyarakat yang membutuhkan dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan BLT.

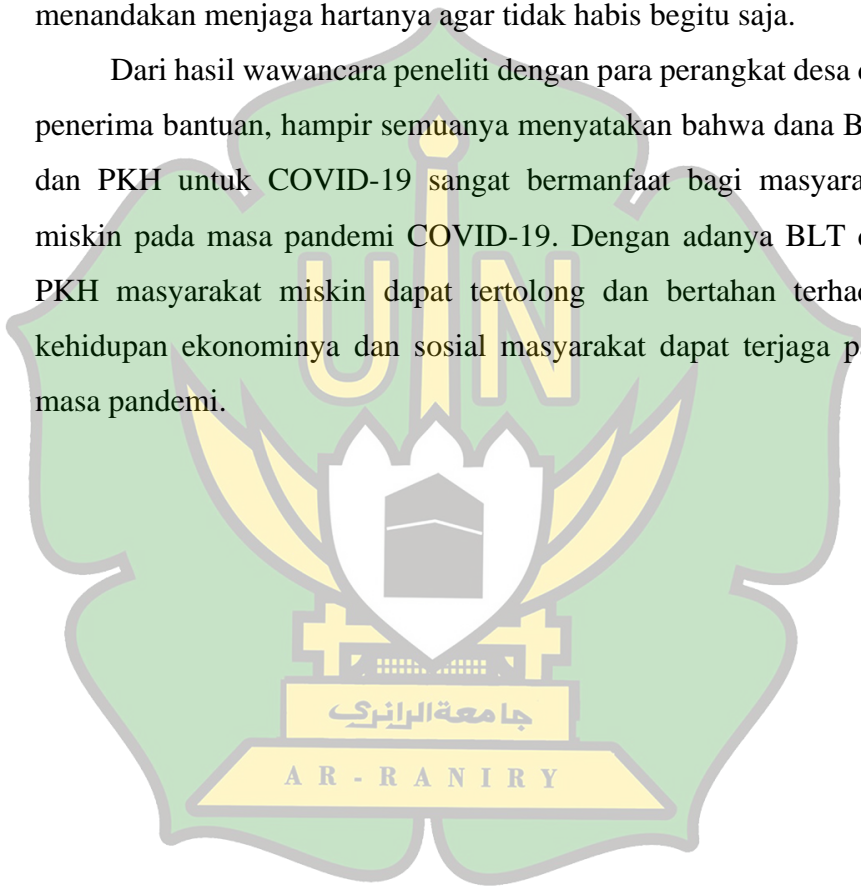
Dalam perspektif Islam, ketahanan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dilihat dari indikator fakir, miskin, dan gharimin. Penelitian ini mendapatkan bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH pada masa pandemi covid-19 hampir secara keseluruhan diberikan kepada kalangan atau orang fakir yaitu mereka yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dan sebagian juga ada mereka masuk dalam kalangan gharimin yaitu yang mempunyai hutang dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH tersebut sebagian untuk membayar hutang yang mana hutang tersebut adalah hutang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH ini tidak ditemukannya untuk orang miskin yang disebutkan

dalam konteks Islam yaitu mereka yang tidak mempunyai apa-apa yang secara umum kondisinya lebih buruk dari fakir.

Pandangan ekonomi Islam, menurut *al-Shatibi* pemenuhan kebutuhan terbagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan *al-dharuriyah* (bersifat pokok dan mendasar), kebutuhan *al-hajiyyah* (bersifat kebutuhan sebagai pelengkap), dan kebutuhan *at-tahsiniyyah* (bersifat penyempurna) (Havis, 2019). Dalam penelitian keluarga di desa Lamgugob dilihat dari ekonomi Islam mereka memanfaatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH pada masa pandemi covid-19 lebih diutamakan untuk kebutuhan *al-dharuriyah* yaitu kebutuhan yang bersifat pokok dan mendasar seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mendasar yaitu *al-nafs*, yaitu kebutuhan diri dan jiwa. Selain untuk kebutuhan pokok masyarakat atau informan juga untuk memenuhi kebutuhan yang harus dijaga seperti melahirkan anak, dan keturunan yang mereka biayai untuk sekolah anaknya agar akal dan intelektualnya terjaga. Kedua, kebutuhan *al-hajiyyah* yang bersifat kebutuhan sebagai pelengkap. Beberapa keluarga di desa Lamgugob memanfaatkan dana BLT dan PKH tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pokok, sebagian dari mereka yang memiliki usaha dana tersebut digunakan sebagai tambahan modal dan akan terus berputar uang tersebut dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, kebutuhan *at-tahsiniyyah* merupakan kebutuhan yang bersifat memperindah kebutuhan *al-dharuriyyah* dan *al-hajiyyah*. ada keluarga yang menggunakan dana ini untuk kebutuhan *at-tahsiniyyah* yang mana

keluarga tersebut kebutuhan pokoknya telah terpenuhi karena kepala keluarganya yang telah bekerja lagi, dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH ini dibelikan emas tujuannya yaitu untuk simpanan kelak jikalau ada kebutuhan yang darurat. Informan menandakan menjaga hartanya agar tidak habis begitu saja.

Dari hasil wawancara peneliti dengan para perangkat desa dan penerima bantuan, hampir semuanya menyatakan bahwa dana BLT dan PKH untuk COVID-19 sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin pada masa pandemi COVID-19. Dengan adanya BLT dan PKH masyarakat miskin dapat tertolong dan bertahan terhadap kehidupan ekonominya dan sosial masyarakat dapat terjaga pada masa pandemi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi covid-19, termasuk desa Lamgugob yang mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 untuk mempertahankan keadaan ekonomi keluarga. Penerima BLT semakin bertambah dan tidak berkurang maka dapat disimpulkan efektivitas dan kesejahteraan BLT belum tercapai.
2. PKH pada masa pandemi covid-19 dapat membantu mereka untuk menambah pendapatan dan mencukupi kebutuhan. PKH lebih kepada kemampuan keluarga untuk membiayai anak sekolah. Selain untuk kebutuhan mereka menggunakan dana PKH untuk biaya pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 ini tidak memberikan jaminan keuangan keluarga, hanya saja dana ini dapat membantu mereka perihal keuangan baik

digunakan untuk tabungan dan untuk kesehatan. PKH dapat dikategorikan mencapai efektivitas dan kesejahteraan karena sebagian penerima dapat menabung dana pkh untuk masa depan. Dengan terpenuhinya kebutuhan primer dan dapat menabung untuk masa depan maka sudah mencapai kesejahteraan ekonominya.

3. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan ekonomi keluarga dilihat dari indikator fakir, miskin, dan gharimin. Penelitian ini mendapatkan bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH pada masa pandemi covid-19 hampir secara keseluruhan diberikan kepada kalangan atau orang fakir yaitu mereka yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dan sebagian juga ada mereka masuk dalam kalangan gharimin yaitu yang mempunyai hutang dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagian untuk membayar hutang yang mana hutang tersebut adalah hutang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dan dalam ekonomi Islam, keluarga penerima manfaat dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Lamgugob pada masa pandemi covid-19 dalam memenuhi kebutuhan mereka gunakan untuk: pertama, kebutuhan *al-dharuriyah* seperti membeli sembako, melahirkan anak, biaya sekolah dan kesehatan. Kedua, kebutuhan *al-hajiyyah* seperti dana digunakan untuk tambahan modal usaha yang mana usaha itu untuk

pendapatan keluarga. Ketiga, kebutuhan *at-tahsiniyyah* seperti membeli emas untuk simpanan yang akan datang.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dari pemahasan diatas tersebut kiranya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk akademisi, penelitian dapat dilanjutkan oleh peneliti lain untuk peningkatan pengetahuan dan wawasan yang lebih optimal khususnya Efektivitas Program Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (program keluarga harapan) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengambil konteks yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip etika bisnis Islam dengan menambah variabel lain.
2. Untuk menambah pengetahuan dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam wawasan yang berhubungan dengan Efektivitas Program Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (program keluarga harapan) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini sehingga dapat mengkaji lebih lanjut mengenai indikator efektivitas suatu program dan kemaslahatannya, dan diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada skripsi ini

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., & Hendra, A. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 8(2), 132–144. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2792/1331>
- Dua, I. L., & Rumerung, J. J. (2022). Kajian Efisiensi dan Efektivitas Kerja Karyawan Bidang Administrasi Pada PT. Manado Media Grafika. *Jurnal MAPB*, 4(1), 118–132. <http://jurnal.polimdo.ac.id/index.php/mabp/article/view/329>
- Fauziah, W. R., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas program wirausaha pemuda dalam upaya penurunan angka pengangguran terbuka di kabupaten tegal pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 367–375. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i2.11001>
- Mahmud, F., Mustari, N., & Haq, N. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 17–33. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3396>
- Muchtar. (2016). *Efektivitas Pimpinan*. Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Ahlan, A. (2019). *Kesejahteraan sosial: integrasi perspektif Al-Quran dan sosilogis: studi di Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Akmel, J. E. (2018). *Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukarame*

Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

- Ardiansyah, D., Suharso, W., & Marthasari, G. I. (2018). Analisis Penerima Bantuan Sosial menggunakan Bayesian Belief Network. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 2(2), 506-513.
- Arsyad, L. (2017). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. *Edisi 5 UPP STIM YKPN Yogyakarta*
- Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi'ah, Z., & Tukiman, T. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 874-885.
- Bawadi, Z., & Ratnasari, P. (2023). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 9(1), 71-82.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 47-56.
- Duryat, H. M. (2021). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya Saing*. Penerbit Alfabeta.
- Enggardini, R. V., & Fauzy, M. Q. (2017). Kesejahteraan karyawan perspektif maqashid syariah pada pusat penelitian kopi dan kakao. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(8), 315540.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Kencana.

- Fiolita, N. W. (2021). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Firdaus, T., & Rafiuddin, M. (2021) Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oi Tui Pada Masa Pandemi Covid-19 di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah.
- Hamdani, H. (2015). Kemiskinan Dalam Pandangan Ekonomi Syariah Poverty With Economic Syariah. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 9(2).
- Harwidiansyah, H. (2011). *Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Herawati, L., & Hayati, R. (2020). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Tantaringin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 3(2), 857-869.
- Ilyas, R. (2016). Etika konsumsi dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam. *AT-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 152-172.
- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516-526.
- Ismail, I. (2020). Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 110-134.

- Ismail, M. Z. (2021). *Konsepsi Ilmu Dalam Dinamika Kehidupan Di Era 4.0* (Vol. 71). Duta Media Publishing.
- Jaya, P, & Syahriawiti, W. (2020). Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Efektivitas Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Cirebon. *Cendekia Jaya*, 2(2), 22-46.
- Junaidi, J., & Saleha, N. U. (2021). Konsep Negara Kesejahteraan Menurut M. Umer Chapra. *Syariah*, 9(1), 13-36.
- Kamaruddin, S. (2022). Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Teknologi Finansial Syariah Dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1.
- Kusuma, N. (2016). Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura.
- Mardani, A. A. (2018). Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Penambang Batu Di Gunung Kunyit Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Maulana, F. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Periode 2015-2019 (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Maun, C. E. (2020). efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2).

- Mz, S. R. (2018). Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(01), 67-100.
- Nafiudin, M. (2018). Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. *Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.
- Nahdatullah, N., Arsa, A., & Khairiyani, K. (2021). *Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kelurahan Simpang IV SIPIN)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Nasution. (2019). *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota* (Doctoral dissertation).
- Ningsih, L. R. (2017). *Analisa Dampak Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pola pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Simalungun* (Doctoral dissertation).
- Nizar, M. (2019). Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 3(2), 50-60.
- Nurvita, E. (2019). Strategi Bisnis Bunga Hias Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Muslim Desa Rembang Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Olbata et al (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(64).

- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 11(1), 21-42.
- Reza, M. (2022). *Efektivitas Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pengembangan Usaha Pedagang Pasar (Studi Pada Pasar Tanjung Intan Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Robimadin, C. N., & Cahyono, H. (2020). Kebermanfaatan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Lembaga Manajemen Infaq Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(2).
- Rosalina, I. (2014). efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri Perkotaan pada kelompok pinjaman bergulir di dsa mantren kecamatan Karangrejo kabupaten magetaan. *Publika*, 2(2).
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.
- Rusdi, M. A. (2017). Masalah Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 151-168.
- Samud, S. (2018). Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 215-228.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(3).
- Sitepu, W. A. R. B. (2022). Analisis Bantuan BLT dan PKH untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 Di

Tinjau Dari Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 2(1), 35-43.

Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262.

Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88-92.

Suliyanto, (2017). *Metode penelitian kuantitatif*. Polinema Press. Malang

Sunarti, N. (2019). Efektivitas Pemberdayaan Dalam Pengembangan Kelompok Tani di Pedesaan. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 80-100.

Suryani, A. I. (2010). *Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Susantyo, B., & Nainggolan, T. (2018). Integrasi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 73-84.

Takaredase, J. T., Kaawoan, J. E., & Singkoh, F. (2019). Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

Utomo, D. (2014). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga*

Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Wijaya, A. (2017). *Bahaya khamar dalam perspektif Al-Quran dan kesehatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Yuliani, M. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Yuliharti, Y. (2019). Pembentukan Karakter Islami Dalam Hadis Dan Implikasinya Pada Jalur Pendidikan non Formal. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 4(2), 216-228.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara untuk pihak-pihak yang terlibat dalam program BLT dan PKH di desa Lamgugob yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai penggunaan dana desa yang dipergunakan dalam anggaran BLT dan PKH?
2. Bagaimana teknis dan alur pendataan calon penerima BLT dan PKH?
3. Menurut anda apakah sasaran pemberian program BLT dan PKH di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?
4. Menurut anda apakah mekanisme program BLT dan PKH di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?
5. Bagaimana anda memanfaatkan pemberian Program BLT dan PKH di desa Lamgugob?
6. Apakah menurut anda dengan adanya program BLT dan PKH ini dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan kehidupan dalam keluarga?
7. Apa saran dan harapan dari anda untuk program pemerintah ini kedepannya?

Lampiran 2 Jawaban Pertanyaan Wawancara

Informan	Pihak Dinas Sosial
Nama Narasumber	TM. Syukri. S. SOS
<p>1. Bagaimana pendapat bapak mengenai penggunaan dana desa yang dipergunakan dalam anggaran BLT dan PKH?</p> <p><i>Untuk program yang dilakukan pemerintah ini sudah sangat bagus dikarenakan dengan tujuan pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan saya rasa ini sudah sangat bagus, dan untuk penggunaan dana desa ini lebih efektif.</i></p>	
<p>2. Bagaimana teknis dan alur pendataan calon penerima BLT dan PKH?</p> <p><i>Kriteria Penerima BLT dan PKH diantaranya keluarga miskin ekstrem, keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis, keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel dan nantinya akan ada pendataan dari pemerintah desanya.</i></p>	
<p>3. Menurut anda apakah sasaran pemberian program BLT dan PKH di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?</p> <p><i>Kalau di bilang secara prosudur yang telah kita lakukan sudah tepat sasaran, karena untuk data penerimanya kita lakukan banyak tahapan dan tidak sembarangan.</i></p>	
Informan	Aparatur Desa (Kepala Desa)
Nama Narasumber	Amanullah
<p>1. Bagaimana pendapat bapak mengenai penggunaan dana desa yang dipergunakan dalam anggaran BLT dan PKH?</p> <p><i>Saya setuju, karena peran saya melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai kepala desa dengan membimbing, mengawasi serta mempertanggungjawabkan anggaran desa yang akan di gunakan nantinya.</i></p>	
<p>2. Menurut anda apakah sasaran pemberian program BLT dan PKH di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?</p>	

Yang mendata Keluarga Penerima BLT dan PKH kita libatkan langsung perangkat desa langsung, setelah itu diundang dan melakukan verifikasi data. Data utama seperti foto copy Kartu Keluarga (KK), KTP, dan menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat yang sesuai dengan faktanya dan terjun langsung atau survei ke rumah-rumah warga yang diajukan namanya untuk di cek kebenarannya agar tidak salah sasaran

3. Menurut anda apakah mekanisme program BLT dan PKH di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?

Sudah, karena kami sebelum melakukan penyaluran selalu melakukan musyawarah terlebih dahulu dan setelah penyaluran pun begitu.

4. Apakah menurut anda dengan adanya program BLT dan PKH ini dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan kehidupan dalam keluarga?

Tentu saja akan sangat membantu masyarakat yang ekonominya kebawah, setidaknya ini dapat mengurangi beban hidup mereka.

Informan	Aparatur Desa (Pemuda)
Nama Narasumber	Aiman akbar

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai penggunaan dana desa yang dipergunakan dalam anggaran BLT dan PKH?

Saya setuju, biar ada maanfaat untuk desa itu sendiri

2. Menurut anda apakah sasaran pemberian program BLT dan PKH di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?

Sudah

3. Menurut anda apakah mekanisme program BLT dan PKH di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?

Sudah, karena kami sebelum melakukan penyaluran selalu melakukan musyawarah

4. Apakah menurut anda dengan adanya program BLT dan PKH ini dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan kehidupan dalam keluarga?	
<i>Tentu saja akan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan</i>	
Informan	Aparatur Desa (Mukim)
Nama Narasumber	Irham
1. Bagaimana pendapat bapak mengenai penggunaan dana desa yang dipergunakan dalam anggaran BLT dan PKH?	
<i>Saya sangat setuju, ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat</i>	
2. Menurut anda apakah sasaran pemberian program BLT dan PKH di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?	
<i>Sudah, karena kita banyak tahapan dalam penyaluran agar tepat sasaran</i>	
3. Menurut anda apakah mekanisme program BLT dan PKH di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?	
<i>Sudah</i>	
4. Apakah menurut anda dengan adanya program BLT dan PKH ini dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan kehidupan dalam keluarga?	
<i>Saya berharap ini akan sangat membantu, apalagi yang sangat membutuhkan</i>	
Informan	A R - R A N Penerima BLT
Nama Narasumber	Haris Dahlan
1. Menurut anda apakah mekanisme program BLT di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?	
<i>Kalau menurut saya sudah</i>	
2. Bagaimana anda memanfaatkan pemberian Program BLT di desa Lamgugob?	
<i>Untuk memenuhi kebutuhan sehari hari sudah cukup untuk membeli kebutuhan pokok dan membiayai sekolah anak dari dana BLT ini.</i>	

Saya sekeluarga juga tinggal yang masih punya orang tua, ya istri saya hanya bisa membantu orang tua untuk jualan sarapan pagi selebihnya ya saya untuk mencari nafkah keluarga.

3. Apakah menurut anda dengan adanya program BLT ini dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan kehidupan dalam keluarga?

Sangat membantu seperti yang saya katakan sebelumnya

4. Apa saran dan harapan dari anda untuk program pemerintah ini kedepanya?

Saran saya untuk pemerintah agar tetap melanjutkan program ini

Informan	Penerima BLT
----------	--------------

Nama Narasumber	Alkausar
-----------------	----------

1. Menurut anda apakah mekanisme program BLT di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?

Insya Allah sudah

2. Bagaimana anda memanfaatkan pemberian Program BLT di desa Lamgugob?

Biasa untuk keperluan sehari hari

3. Apakah menurut anda dengan adanya program BLT ini dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan kehidupan dalam keluarga?

Ini sudah sangat membentu kami, dan saya berharap dengan adanya program-program seperti ini akan bertambah lagi program baru yang bertujuan untuk meningkatrkan ekonomi masyarakat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan

4. Apa saran dan harapan dari anda untuk program pemerintah ini kedepanya?

Semoga kedepanya yang menerima BLT semakin banyak agar merata

Informan	Penerima BLT
----------	--------------

Nama Narasumber	Halimah
<p>1. Menurut anda apakah mekanisme program BLT di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?</p> <p><i>Sudah</i></p>	
<p>2. Bagaimana anda memanfaatkan pemberian Program BLT di desa Lamgugob?</p> <p><i>Untuk kebutuhan saya sehari hari seperti membeli beras</i></p>	
<p>3. Apakah menurut anda dengan adanya program BLT ini dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan kehidupan dalam keluarga?</p> <p><i>Alhamdulillah sudah</i></p>	
<p>4. Apa saran dan harapan dari anda untuk program pemerintah ini kedepanya?</p> <p><i>Harapan saya agara dananya di tambah lebih banyak lagi</i></p>	
Informan	Penerima BLT
Nama Narasumber	Baktiar
<p>1. Menurut anda apakah mekanisme program BLT di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?</p> <p><i>Kalau dikatakan sempurna 100% belum, mungkin sudah di usahakan semaksimal mungkin oleh petugasnya</i></p>	
<p>2. Bagaimana anda memanfaatkan pemberian Program BLT di desa Lamgugob?</p> <p><i>Seperti kemaren dana itu saya tabung jadi kalau ada kebutuhan mendadak baru saya pergunakan</i></p>	
<p>3. Apakah menurut anda dengan adanya program BLT ini dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan kehidupan dalam keluarga?</p> <p><i>Sudah pastinya, apalagi seperti saya yang masih belum stabil ekonominya</i></p>	

<p>4. Apa saran dan harapan dari anda untuk program pemerintah ini kedepannya?</p> <p><i>Harapan saya agar dapat lebih baik dan semaksimal mungkin dalam penyalurannya dan semoga ada program baru dalam rangka mengurangi kemiskinan seperti lapangan pekerjaan</i></p>	
Informan	Penerima BLT
Nama Narasumber	Samsul Lidan
<p>1. Menurut anda apakah mekanisme program BLT di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?</p> <p><i>Semoga saja sudah</i></p> <p>2. Bagaimana anda memanfaatkan pemberian Program BLT di desa Lamgugob?</p> <p><i>Saya untuk dana darurat dan untuk belanja kebutuhan sehari-hari</i></p> <p>3. Apakah menurut anda dengan adanya program BLT ini dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan kehidupan dalam keluarga?</p> <p><i>Rasa rasa ini akan sangat membantu dan dampaknya cukup lumayan besar seperti yang saya rasakan</i></p> <p>4. Apa saran dan harapan dari anda untuk program pemerintah ini kedepannya?</p> <p><i>Kalau bagi orang awam seperti saya yang penting program yang di ciptakan bermanfaat untuk masyarakat sudah habis perkara</i></p>	
Informan	Penerima PKH
Nama Narasumber	Hilda Rahayu
<p>1. Menurut anda apakah mekanisme program PKH di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?</p> <p><i>Menurut saya sudah</i></p> <p>2. Bagaimana anda memanfaatkan pemberian Program PKH di desa Lamgugob?</p>	

Saya pergunakan untuk kebutuhan sehari hari

3. Apakah menurut anda dengan adanya program PKH ini dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan kehidupan dalam keluarga?

Oh sangat membantu tentunya, apalagi jaman sekarang sulit untuk kerja aja susah apalagi seperti saya seorang ibuk rumah tangga

4. Apa saran dan harapan dari anda untuk program pemerintah ini kedepanya?

Dengan harapan program ini dapat berlanjut

Informan	Penerima PKH
Nama Narasumber	Amir
1. Menurut anda apakah mekanisme program PKH di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?	
<i>Sudah cuman belum maksimal</i>	
2. Bagaimana anda memanfaatkan pemberian Program PKH di desa Lamgugob?	
<i>Alhamdulillah cukup untuk belanja dapur dan jajan anak</i>	
3. Apakah menurut anda dengan adanya program PKH ini dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan kehidupan dalam keluarga?	
<i>Insya Allah cukup dan saya sangat bersyukur dapat</i>	
4. Apa saran dan harapan dari anda untuk program pemerintah ini kedepanya?	
<i>Saran saya agar dapat membuka pekerjaan dan serinya dilakukan pelatihan itu saja</i>	
Informan	Penerima PKH
Nama Narasumber	Zubaidah
1. Menurut anda apakah mekanisme program PKH di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?	

Semoga saja sudah

2. Bagaimana anda memanfaatkan pemberian Program PKH di desa Lamgugob?

Beli sembako sama beras saja

3. Apakah menurut anda dengan adanya program PKH ini dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan kehidupan dalam keluarga?

Alhamdulillah sangat membantu meringankan beban keluarga saya

4. Apa saran dan harapan dari anda untuk program pemerintah ini kedepannya?

Harapan saya agar pemerintah ada program yang baru tentang bantuan

Informan	Akademisi
Nama Narasumber	Soraya Lestari

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai penggunaan dana desa yang dipergunakan dalam anggaran BLT dan PKH?

Saya sangat setuju dengan maksud untuk masyarakatnta dan ini lebih membantu karena banyak dana desa yang mengangur

2. Bagaimana teknis dan alur pendataan calon penerima BLT dan PKH?

Untuk teknis dalam penyaluran itu sudah di atur oleh ketentuan yang ada. Palimngan tinggal pelaksanaannya yang maksimal saja

3. Menurut anda apakah sasaran pemberian program BLT dan PKH di desa Lamgugob sudah tepat sasaran?

Untuk menghindari dan menimalisir tidak tepat sasaran adalah dengan bekerja sama dengan perangkat desa. Perangkat desa mengetahui secara baik karakteristik masyarakat desanya. Data penyaluran harus selalu diupdete oleh perangkat desa sebelum pembagian agar adanya pemerataan dan tepat sasaran.

Lampiran Dokumentasi Penelitian



AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Muhammad Nabil
Tempat & Tanggal Lahir : Banda Aceh, 24 Februari 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : Desa Lamgugob, Kec Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh
No. Hp/Telp : +62 853-5808-4180
Gmail : 170602138@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

Pendidikan MI/Sederajat : SDN 24 Banda Aceh
Pendidikan MTs/Sederajat : MTsN 4 Banda Aceh
Pendidikan MA/Sederajat : SMAN 8 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Ayah : Syawaluddin
Ibu : Nurlena
Alamat Orang Tua : Desa Lamgugob, Kec Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh